



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, MENGHADIRKAN DIRUT PT
PERIKANAN INDONESIA DAN DIRUT PT GARAM**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 7 (Tujuh)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Waktu : Pukul 13.25 WIB s.d. 16.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI / F-PDIP
Acara : 1. RKA K/L Tahun 2023 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi);
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
3. Isu-isu Aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
41 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Sunarna, S.E., M.Hum. - Virtual
 - 3) Ir. Mindo Sianipar. - Virtual
 - 4) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 - 5) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 - 6) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 - 7) Maria Lestari, S.Pd.
 - 8) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 8 orang Anggota
 - 1) H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

- 2) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual
 - 3) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 - 4) Ir. Panggah Susanto, M.M. - Virtual
 - 5) Alien Mus.
 - 6) Ravindra Airlangga, M.S.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota
- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 - 3) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 4) Ir. Dwita Ria Gunadi,
 - 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si. - Virtual
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
5 dari 6 orang Anggota
- 1) Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. Abdullah Tuasikal -Virtual
 - 3) Julie Sutrisno
 - 4) Yessy Melania, S.E.
 - 5) Ir. Hj. Sri Kustina -Virtual
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 6 orang Anggota
- 1) Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A. – Virtual
 - 2) Daniel Johan, S,E.
 - 3) Drs. H. Ibnu Multazam
 - 4) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
- 1) Dr. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 - 3) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5 dari 5 orang Anggota
- 1) drh. H. Slamet. - Virtual
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.- Virtual
 - 3) Dr. Hermanto, S.E., M.M.- Virtual
 - 4) H. Johan Rosihan, S.T.
 - 5) Saadiyah Uluputty, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
3 dari 4 orang Anggota
- 1) Haerudin, S.Ag.,M.H.
 - 2) Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. – Virtual
 - 3) Ir. Alimin Abdullah
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 orang Anggota
- 1) Ema Umiyyatul Chusnah -Virtual

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

Fraksi Partai Amanat Nasional

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T.M.M. (Matriks)

C. Pemerintah

1. Menteri Kelautan dan Perikanan (Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.);
2. Sekretaris Jenderal (Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum.);
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si.);
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dr. TB Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc.);
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.);
6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han.);
7. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.);
8. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc.);
9. Plt. Inspektur Jenderal (Ir. Teuku Nilwan, M.M.);
10. Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ir. Ishartini);
11. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Sigit Muhartono); dan
12. Direktur Utama PT Garam (Persero), (Arif Haendra).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. /KETUA KOMISI IV DPR RI):

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Kelautan beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Perikanan Indonesia,
Yang terhormat Direktur Utama PT Garam beserta jajaran,

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi Bamus pada tanggal 23 Juni 2022 dan rapat keputusan internal Komisi IV tanggal 18 Agustus 2022. Pada hari ini, Selasa 30 Agustus Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas:

1. RKA K/L Tahun 2023. Hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi;
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
3. Isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan tentang Tata Tertib rapat ini Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.25 WIB)

Rapat hari ini kita mulai pada pukul 13.25 WIB dan akan diakhiri pada pukul 17.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN beserta nota keuangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Komisi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program kegiatan Kementerian/Lembaga dan hasil pembahasan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis. Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Kerja hari ini adalah sesuai dengan Surat Badan Anggaran Nomor B/12412/AG.04.01/06/2022 tanggal 29 Juni mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan rencana undang-undang APBN Tahun Anggaran 2023 antara komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Pemerintah telah berupaya mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia akibat Covid-19, antara lain dengan melakukan kebijakan fiskal dengan tujuan agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak tumbuh positif. Tentu langkah-langkah adaptif dalam menghadapi segala sesuatunya serba mungkin harus segera diantisipasi sejak dini. Misal membuat program dan kebijakan kegiatan bersifat aplikatif, terukur, dan terencana, serta bersifat langsung mengenai sasaran masyarakat hal ini tentunya menjadi harapan dan komitmen kita bersama dalam sinergitas menjalankan suatu program dan kegiatan untuk Indonesia yang kita cintai bersama. Terlebih capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 telah mendapatkan opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut menjadi pemicu semangat Komisi IV sebagai Mitra kerja KKP untuk senantiasa menjalankan fungsinya secara optimal dalam ikut serta membangun sektor Kelautan dan Perikanan kedepan. Namun, capaian tersebut janganlah membuat KKP terbuai karena banyak harapan rakyat yang belum terselesaikan dan masih banyak program dan kegiatan yang dinanti keahadirannya secara konkrit jelas oleh masyarakat pada umumnya.

Dari uraian di atas, Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menyajikan kepastian kebijakan dalam kerangka regulasi yang jelas serta kerangka pendanaan program dan kegiatan 2023 dengan Pagu Anggaran Rp6,7 triliun secara rinci guna menciptakan iklim usaha yang kondusif menuju masyarakat Kelautan dan Perikanan yang makmur dan sejahtera. Hal ini agar sejalan dengan penjabaran tahun keempat pada RPJMN tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya, Komisi IV meminta penjabaran kepada KKP terkait dengan teknis rancangan kegiatan Dana Alokasi Khusus 2023 yang mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta mendukung ketahanan pangan yang berdasarkan pada Provinsi dan Kabupaten sebesar Rp1,23 triliun.

Saya akan menampilkan gambar dulu, gambar ini sangat penting sekali, coba tampilkan. Kita lihat disini kondisinya, ini adalah Pelabuhan Muara Baru, kurang lebih sekarang yang tampak labuh di sana ada 600 kapal. Yang setengah tenggelam ini kurang lebih 20 sampai 30, makin lama mereka tidak jalan maka nanti akan menghambat alur keluar masuknya kapal, dan ini menjadi tanggung jawab siapa? Karena kalau di laut menjadi tanggung jawab Dirjen Tangkap. Kalau ini kita biarkan terus menerus tenggelam di pinggir Dermaga apa jadinya nanti, kalau ditenggelamkan akan lain lagi ceritanya, otomatis menghambat alur, mau dibakar, tidak mungkin karena di situ kurang lebih ada 600 kapal yang tambat belum bisa jalan. Jadi saya minta segera dicarikan solusinya, bulan September Komisi IV akan Kunspek ke Muara Baru lagi. Jadi sebelum September dicarikan jalan keluarnya ini mau diapakan, diangkat ke atas atau ditenggelamkan, tapi

dengan konsekuensinya adalah akan mengganggu alur lalu lintas laut di sekitarnya.

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Silakan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Pimpinan dan juga seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja yang membahas agenda pokok yaitu RKA K/L KKP tahun 2023, Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023, dan isu-isu aktual lainnya.

Sebelum melanjutkan menyampaikan penyampaian kami tentang Rencana Kerja dan Anggaran KKP tahun 2023, izinkan kami memperkenalkan Saudari Doktor Pamuji Lestari yang telah dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Izinkan pertama-tama kami menyampaikan realisasi penyerapan anggaran KKP Tahun 2022 per tanggal 25 Agustus 2022 telah tercapai sebesar 67,43% bila dihitung dengan *outstanding* kontrak dan dibandingkan dengan pagu setelah dilakukan *Automatic Adjustment*, dalam hal ini kami akan terus memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2022.

Selanjutnya berkaitan dengan usulan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran KKP tahun 2023, KKP mengacu pada tema dan arah kebijakan RKP tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diarahkan untuk:

- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan;
- Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;

- Mendorong pemulihan dunia usaha;
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang respon terhadap perubahan iklim;
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; serta
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Indikator kinerja utama KKP yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, antara lain:

- Pertumbuhan PDB perikanan 4-6%;
- Produksi perikanan 30,31 juta ton;
- Ekspor hasil perikanan USD7,6 miliar;
- Angka konsumsi ikan 61,02 kg per kapita;
- Nilai Tukar Nelayan 107;
- Luas kawasan konservasi 29,1 juta hektar; dan
- Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97%.

Guna mencapai target tersebut KKP menetapkan arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, yaitu:

1. Perluasan wilayah konservasi perairan;
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan;
3. Pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan;
4. Pengelolaan sampah laut; dan
5. Pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil.

Yang diperkuat dengan:

- Peningkatan daya saing;
- Penguatan pengawasan; dan
- Peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617 dan B.577 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, KKP mendapatkan Pagu Anggaran tahun 2023 sebesar Rp6,76 triliun yang terdiri dari:

- Rupiah Murni sebesar Rp6,46 triliun;
- Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp1 miliar;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp160,55 miliar;
- Badan Layanan Umum sebesar Rp72,47 miliar; dan
- Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp76,15 miliar.

Adapun menurut penggunaannya untuk kegiatan operasional dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun, non operasional sebesar Rp3,43 triliun dengan tambahan pagu anggaran sebesar Rp663,23 miliar. Dari jumlah pagu

anggaran tersebut, KKP memberikan dukungan terhadap prioritas nasional ke 1, 2, 3, 4, 6, dan 7.

Untuk rancangan pagu anggaran KKP berdasarkan program adalah sebagai berikut:

1. Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp2,49 triliun;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp168,32 miliar;
3. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp92 miliar;
4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp308,3 miliar; dan
5. Program dukungan manajemen sebesar Rp3,71 triliun.

Usulan Pagu anggaran berdasarkan unit kerja Eselon I KKP adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal sebesar Rp678,16 miliar;
2. Inspektorat Jenderal sebesar 58 eh *sorry*, Rp85,31 miliar;
3. Direktur Jenderal Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp955,65 miliar;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp1,18 triliun;
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,15 triliun;
6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp388,50 miliar;
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp420 miliar;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,38 triliun; dan
9. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp523,50 miliar.

Dengan komposisi:

- Rupiah Murni sebesar Rp6,46 triliun;
- PHLN sebesar Rp77,14 miliar;
- PNBP sebesar Rp160,54 miliar;
- PNBP BLU sebesar Rp72,47 miliar.

Dapat kami laporkan bahwa rencana penarikan pinjaman luar negeri tahun 2023 adalah sebesar Rp76,15 miliar untuk membiayai proyek-proyek pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah tertuang dalam dokumen *Green Book* tahun 2022.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Usulan rencana penggunaan tambahan anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp663,43 miliar akan digunakan untuk:

- Menambah alokasi bantuan pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi;
- Sarana prasarana untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, serta penyediaan sistem rantai dingin dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
- Penambahan biaya operasional;
- Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Pengelolaan ruang laut;

- Peningkatan kapasitas SDM;
- Penguatan sarana uji mutu;
- Peningkatan sarana prasarana pengawasan berbasis teknologi satelit; serta
- Penguatan pengawasan internal.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan *highlight* rancangan kegiatan prioritas KKP tahun 2023 sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap dengan anggaran Rp955,65 miliar, antara lain untuk:
 - Implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota; dan
 - Pengembangan kampung nelayan maju dengan dukungan sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan.
2. Ditjen Perikanan Budidaya dengan anggaran Rp1,18 triliun, antara lain digunakan untuk:
 - Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor Udang, Lobster, Kepiting, dan Rajungan dan Rumput laut; serta
 - Pengembangan perikanan budidaya di kawasan sentra produksi termasuk Kampung Perikanan Budidaya.
3. Ditjen Penguatan Daya Saing produk KP dengan anggaran Rp388,50 miliar, antara lain untuk:
 - Peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - Pembangunan sistem rantai dingin;
 - Pengembangan usaha dan investasi; serta
 - Promosi produk skala internasional.
4. Ditjen Perencanaan Ruang Laut dengan anggaran Rp420 miliar, antara lain untuk:
 - Pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
 - Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk gerakan bulan cinta laut;
 - Pengelolaan garam rakyat; dan
 - Perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
5. Ditjen Pengawasan Sumberdaya KP dengan anggaran Rp1,15 triliun, antara lain untuk:
 - Operasi pengawasan penangkapan ikan terukur atau melalui operasional kapal pengawasan dan pesawat patroli;
 - Pengawasan usaha sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - Pemberdayaan Pokmaswas.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan dengan anggaran Rp1,38 triliun, antara lain digunakan untuk:
 - Pelatihan usaha bagi masyarakat;
 - Penyuluhan kepada masyarakat;
 - Penyelenggaraan pendidikan vokasi; serta
 - Pengembangan inkubasi usaha KP.
7. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan anggaran Rp523,50 miliar, antara lain untuk:
 - Penerapan sistem jaminan mutu;
 - Penerapan sistem perkarantinaan;
 - Pengembangan laboratorium referensi dan akreditasi; dan

- Pengawasan di wilayah perbatasan.
8. Sekretaris Jenderal dengan anggaran Rp678,16 miliar, antara lain:
 - Layanan penyiapan produk hukum;
 - SDM aparatur dan organisasi;
 - Keuangan, perencanaan, kerja sama antarlembaga umum dan pengadaan barang dan jasa;
 - Humas dan kerja sama luar negeri;
 - Data statistik dan informasi; dan
 - Pengelolaan dana kelolaan LPMUKP.
 9. Inspektorat Jenderal dengan anggaran Rp85,31 miliar, antara lain:
 - Pengawasan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, petambak garam, serta masyarakat pesisir lainnya, maka KKP berkomitmen untuk melaksanakan program bantuan pemerintah di tahun 2023 termasuk pembangunan di wilayah timur Indonesia dalam rangka mendukung lumbung ikan nasional.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Kebijakan Dana Alokasi Khusus fisik tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, serta mendukung ketahanan pangan yang didalamnya termasuk DAK bidang Kelautan dan Perikanan. Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dikelompokkan menjadi dua, yaitu: DAK KP untuk provinsi dan DAK KP untuk Kabupaten/Kota. Adapun kriteria teknis penilaian DAK sebagai bagi provinsi adalah:

1. Sentra produksi kelautan dan perikanan;
2. Lokasi *Major Project*;
3. Masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dan telah P3D;
4. Status atau penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
5. Tingkat kerawanan IUU *Fishing*; dan
6. Provinsi bercirikan kepulauan.

Sedangkan kriteria teknis untuk Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta produksi olahan perikanan;
2. Jumlah nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan; dan
3. Sentra kelautan dan perikanan.

Dapat kami sampaikan untuk tahun 2022 pagu indikatif DAK bidang KP tahun 2023 sebesar Rp1,23 triliun meningkat Rp100,58 miliar dari tahun 2022. Adapun menu DAK Provinsi adalah untuk:

- Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- Pembangunan atau rehabilitasi unit perbenihan;

- Sarana dan prasarana pengawasan dan kawasan konservasi.
- Sedangkan untuk DAK Kabupaten/Kota adalah untuk:
- pembangunan atau rehabilitasi unit perbenihan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil;
 - Sarana dan prasarana pemberian usaha pembudidaya ikan skala kecil; serta
 - Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja kali ini.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ketua, Bapak dan Ibu, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan KKP.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya.

Sebelum anggota menanggapi atau bertanya, saya minta Dirjen Tangkap silakan yang tadi saya tampilkan, mau diapain itu?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketua.

Kami sudah langsung instruksikan kepada Kepala Pelabuhan yang pertama untuk mengidentifikasi siapa pemilik kapalnya, kemudian proses status perizinannya, dalam waktu dekat akan kami panggil besok yang bersangkutan dan selanjutnya akan kami eksekusi apakah itu akan diangkat atau kita akan musnahkan Pak karena harus seizin yang memiliki Pak. Insha Allah sebelum reses Komisi IV ke lokasi sudah akan kami selesaikan Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Reses masih lama. Bulan September kami akan ke sana, jadi kalau anda bilang eksekusi, berapa lama waktunya? Saya harus jelas di sini, karena

ini ada 20 unit lebih kapal di sana yang kondisinya seperti tadi. Belum lama ini kan terjadi kebakaran 1 kapal kan? Betul kan?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Iya Pak. Kami minta waktu 2 minggu, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

2 minggu sudah eksekusi?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KKP (DR. IR. MUHAMMAD ZAINI, M.M.):

Eksekusi.

KETUA RAPAT:

Ya. Nanti tolong masukkan dalam kesimpulan rapat mengenai bangkai-bangkai kapal yang menghambat alur keluar masuk Pelabuhan, selambat-lambatnya 2 minggu sudah selesai.

Saya persilakan yang pertama Ibu Alien Mus, silakan dari Fraksi Golkar daerah pemilihan Maluku Utara.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Lengkap.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV dan juga Bapak Ibu Anggota Komisi IV, Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta jajaran Eselon I KKP yang saya hormati, Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aamiin.

Pak Menteri, izin Ketua, sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Menteri tadi saya berharap kita sudah mau masuk di penghujung tahun sebentar lagi 9, bulan 9 kita udah masuk 9, bulan 9, dan 3 bulan lagi adalah masa-masa bagaimana KKP untuk bisa menyerap anggaran yang sudah ada di semua Eselon I. Mudah-mudahan bisa lagi WTP, dan penyerapannya bisa tinggi lagi di tahun 2022.

Saya mau menyampaikan, Pak Menteri. Tadi sudah dilakukan Rapat Paripurna DPR kalau *nggak* salah KKP itu cuma mendapat anggaran, ya walaupun ada tambahan tapi sangat miris untuk saya karena masih kecil Rp6,1 triliun. Menurut saya ini tidak ada apa ya atensi dari pemerintah, karena kita punya laut yang besar, yang luas, dan juga kita punya potensi perikanan yang luar biasa selain dari sumber daya alam yang ada adalah pertambangan, kita

punya laut dan ikan yang luar biasa, tapi lagi-lagi tidak ada atensinya pemerintah untuk di bidang perikanan dan kelautan.

Kemudian, Pak Menteri tadi sudah sampaikan tentang pagu indikatif DAK di bidang Kelautan dan Perikanan. Tentunya 1 triliun lebih untuk 500 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi itu masih kecil DAK-nya, tapi ya mau diapain lagi ya. Saya ingin menanyakan Pak Menteri tentang bagaimana yang sudah disampaikan kemarin PP 85 menurut penyampaian Pak Menteri pada Raker kemarin bahwa PP 85 itu belum diterapkan, nah ini kita juga mau cari kejelasannya.

Kedua, kita juga melihat bahwa di tahun 2022 ada anggaran Pak Menteri untuk *shrimp estate*, budidaya ya, kalau *nggak* salah perkembangannya seperti apa nih di bulan 9 ini. Budidaya yang ada di mana ya itu namanya, Kebumen, Kebumen perkembangannya udah sampai sebagaimana persentasi persentasi pembangunannya udah seperti apa, tolong kita disampaikan juga.

Kemudian, saya mau menyampaikan Pak Menteri. Tadi sudah singgung beberapa Provinsi, untuk lumbung ikan nasional saya lihat ada beberapa acuan anggaran juga nih di 2023, 2022 juga ada. Tapi Pak Menteri, saya merasa bahwa kalau seandainya Lumbung Ikan Nasional di Maluku dan Maluku Utara ini betul-betul ada perhatiannya kalau anggarannya *nggak* ada juga percuma Pak, jadi ya *nggak* usah lah kita bicarain soal ini. Pelabuhannya juga yang setahu saya untuk Pelabuhan Perikanan bukan juga dari anggaran KKP, tapi disitu ada di Perhubungan, jadi kita mau bahas apa ini. Yang intinya adalah kalau kita berbicara dengan PP 85 ini panjang, saya mohon dengan sangat kita ada agenda terkhusus untuk dibahas di luar rapat-rapat kerja.

Dan untuk di Budidaya pun sama Pak Menteri, karena ini pasti panjang pembahasannya, tentang *Shrimp Estate*, tentang budidaya rumput laut, yang mana selalu menjadi alasan semua orang karena mereka bilang harganya selalu terjamin 32.000, 35.000, apa yang bisa diberikan bantuan kepada budidaya rumput laut.

Untuk PDS Pak Menteri, ini penting sekali di daerah-daerah kita ke Belawan khususnya di daerah-daerah yang yang tidak memiliki listrik yang baik. Jadi kita butuh juga *cold storage portable* yang bisa jalan dari antar desa, kecamatan, dan Kabupaten, mohon ini juga di atensikan.

Untuk di Dirjen Tangkap Pak Zaini. Kami kan sudah sampaikan, pelabuhan-pelabuhan besar memang penting, tapi kita juga butuh pelabuhan-pelabuhan sandar untuk perahu-perahu nelayan yang kecil. Kalau bisa diberikan juga atensi kepada mereka. Kita butuh itu karena kayak di daerah saya mau sandar di pelabuhan besar itu susah, yang ada harus sandar di pelabuhan-pelabuhan yang kecil, itu pun terbuat dari bambu biasanya berongga dari pohon kelapa kalau *nggak* dari kayu. Tolonglah kita diperhatikan, apalagi daerah-daerah Timur.

Untuk di PRL. Pak Menteri, saya pikir Dirjen PRL juga harus di atensikan untuk peletakan rumpon karena ini kalau peletakannya amburadul juga

mengganggu semuanya, pertama ikan-ikan kecil pun masuk di dalam rumpun itu, nah ini juga harus kita atensikan.

Terus di PDS eh PDSKP. Saya harap dengan sangat kalau bisa *illegal fishing* ini udah bisa terkontrol Pak Menteri, karena ini selalu terjadi. Kemarin lagi di Maluku Utara sama lagi terjadi *illegal fishing* dari negara tetangga, ya tapi.

KETUA RAPAT:

Bu Alien masih lama, Mbak Alien?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Satu ini saja, Pak.

Oke deh, kalau gitu. Jadi lupa, jadi ya udah nanti saya sampaikan tambahan lagi kalau memang masih punya waktu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Karena sesuai Tatib kan 3 menit, tapi kalau mau nambah silakan. Seperti kita makan nasi di rumah makan Padang, makannya sepiring nambahnya dua piring Mbak Alien.

Mbak Dwi Ria, Fraksi Gerindra. Silakan.

F-P.GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Saudaraku Menteri Kelautan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono,
Sekretaris Jenderal dan pejabat Eselon I Kementerian Kelautan Perikanan beserta seluruh jajarannya,

Sehubungan dengan pembahasan materi rapat pada hari ini yang berkaitan dengan RKA K/L tahun 2023. Izinkanlah saya, Dwita Ria A-76 mewakili Fraksi Gerindra untuk menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, dan masukan sebagai berikut. Ini ada 10 poin Pak Menteri, tapi nanti ada beberapa saja yang saya sampaikan dan lainnya secara tertulis.

Pertama, realisasi penyerapan Anggaran KKP hingga 29 Agustus 2022 tercatat sebesar 67,43% *pasca Automatic Adjustment*. Fraksi Gerindra meminta KKP menyusun strategi untuk memastikan penyerapan anggaran tahun 2022 ini mencapai 100%. Selain realisasi belanja, Fraksi Gerindra

meminta agar KKP lebih berorientasi pada *output* program yang dijalankan, sehingga kedepan perbandingan antara realisasi belanja dan capaian *output* menjadi seimbang.

Yang kedua, Pak Menteri. Rencana Kerja Pemerintah KKP tahun 2023 Nilai Tukar Nelayan ditargetkan sebesar 107, bahkan ada beberapa provinsi dibawah 100. Kami ingin meminta penjelasan bagaimana langkah KKP untuk mencapai target tersebut.

Kemudian tentang pengembangan *blue carbon* menjadi salah satu solusi untuk mencapai komitmen penurunan emisi 29% dan 41% yang tertuang dalam NDC. Namun sektor (*suara tidak jelas*) belum memasukkan dalam strategi mitigasi penurunan emisi dalam dokumen tersebut Pak. Nah Kami ingin meminta kontribusi KKP pada rehabilitasi mangrove bisa terukur dan dicatatkan sebagai kontribusi mitigasi perubahan iklim di sektor Kelautan.

Kemudian selanjutnya, kami ingin meminta penjelasan tentang kegiatan skema penggunaan anggaran pada program penerima Anak Pelaku Utama (APU). Kalau *nggak* salah saya baca tuh 27, 275 Taruna pendidikan vokasi dengan anggaran Rp30 juta per orang itu akan dilaksanakan di mana Pak.

Nah yang terakhir ini, pengelolaan pulau-pulau kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah mutlak melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, tapi pada kenyataannya Pak banyak tambang di pulau-pulau kecil yang mengancam ekosistem pola tersebut yang izinnnya dikeluarkan oleh ESDM. Kami minta penjelasan Pak Menteri, bagaimana tanggapan KKP dalam menjalankan fungsi dan pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut.

Demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya, silakan Pak Abdullah Tuasikal.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV, Pak Menteri beserta jajarannya,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Hari ini dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya mewakili Fraksi Partai Nasdem waktu itu ada berapa hal yang terkait kegiatan hari ini. Pada Rapat Kerja hari ini Fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan berapa hal.

Yang pertama ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2022 tumbuh impresif sebesar 5,44% *year on year* dan sebesar 3,7% *quarter to quarter*. Hal tersebut menandakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha dan yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor perikanan sendiri tumbuh sebesar 2,73% yang didorong oleh peningkatan produksi perikanan. Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus berkontribusi dalam menjaga tren pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan produksi perikanan nasional, baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Dua, Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi KKP atas realisasi pendapatan negara berupa PNBPN tahun 2021 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentu saja capaian tersebut harus terus ditingkatkan, salah satu upaya KKP untuk meningkatkan PNBPN sektor Kelautan dan Perikanan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota setiap wilayah pengelolaan perikanan. Fraksi Partai Nasdem berharap kebijakan tersebut dapat segera terealisasi, sehingga dapat secara optimal meningkatkan pendapatan negara. Untuk itu pada anggaran 2023 kami mendorong KKP agar memprioritaskan percepatan regulasi dan pembangunan infrastruktur pendukung sehingga kebijakan penangkapan ikan terukur dapat segera diimplementasikan.

Pak Menteri yang saya hormati,
Pak Ketua,

Saya kira kita sudah ada pada penangkapan terukur, tapi yang kita harap adalah regulasinya. Karena apapun juga regulasi mengatur kita, mengatur pemerintah, dan mengatur pengusaha, dan masyarakat, ini yang sangat penting. Karena penangkapan itu sudah jalan, tapi regulasinya juga kita harapkan agar benar-benar ya artinya benar-benar itu agar bisa disosialisasikan khususnya kepada masyarakat, karena masyarakat sekarang ini selalu bertanya apa yang dimaksudkan dengan penangkapan ukur, itu yang pertama.

Yang kedua, syukur *Alhamdulillah* Lumbung Ikan nasional Maluku ini sudah mulai muncul ya ada di anggaran ini, tapi sejauh seperti apa itu kita lihat dampaknya itu belum ada serta meregulasi ya. Kami tanyakan juga, Insya Allah rancangan aturan eh soal Peraturan Presiden soal Lumbung Ikan Nasional Maluku ini mudah-mudahan regulasinya ada supaya langkah-langkah konkrit juga ada.

Selanjutnya Pak Menteri. Yang kita lihat dalam kegiatan-kegiatan aspirasi, kegiatan aspirasi ini kelihatannya juga di daerah ini cukup membingungkan ya. Budaya budidaya air tawar, kita *nggak* tahu kita udah dapat berapa yang kita harus bagikan dan harus dibagikan untuk siapa ya. Ini mestinya harus menjadi perencanaan yang sangat cukup matang agar perencanaan jalan agar pemerintah itu dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang optimal tanpa harus ada sewaktu-waktu kalau ada pemeriksaan jadi masalah.

Pertanyaan saya juga soal budidaya air tawar ini sudah sejauh mana. Apakah ini swakelola, tender, atau apa, supaya kita cek bahwa pelaksanaan di daerah soal budidaya air tawar ini terealisasi itu berapa persen ya, itu yang satu. Yang kedua, ini saya belum lihat ya karena baru saya terima *nggak* sempat baca, apakah 5 GT dan lain-lain GT-GT itu masih ada apa atau tidak ya. Dan setiap kali kita ya CPCL masyarakat, tapi hanya *refocusing-refocusing* sampai sekarang ini kita tidak ada apa. Untuk itu kita harapkan agar keseriusan dari Kementerian dan tidak mengecewakan masyarakat ya dan kita juga namanya tidak negatif di masyarakat.

Untuk itu, usulan saya aja Pak Menteri. Kan CPCL kita buat ya, kearifan lokal kita tahu soal perikanan ada di daerah kita, Maluku, Maluku Utara ya Sumatera kita memiliki itu. Nah kalau kita dijatahkan berapa, umpamanya, oh sekian ya silakan aja masing-masing Rp2 miliar ya kita rancang, kita usulkan. Memang kalau sesuai dengan ya sesuai dengan kearifan lokal dan itu jalan, saya kira untuk kepentingan masyarakat terwujud ya. Disini juga ada apa ya ada, bicara soal rumpon Pak Menteri, saya kira rumpon itu sangat cukup penting. Kalau memang dijatahkannya, bukan dijatahkan, lalu ini kita kerja, tidak, ya kita tidak kerja, ini hanya untuk kepentingan masyarakat. Kalau diberikan jatah sekian banyak, itu makanya kita bisa rancang berapa rumpon, berapa mesin 15 PK atau sekian PK, sehingga kita menghindari yang namanya GT-GT 5 GT dan lain-lai. 5 GT udah Rp500 juta, seandainya ya itu udah lumayan kan kita lari ke rumpon itu umpamanya rumpon itu kita bisa dapat 3 atau 4 untuk kelompok masyarakat, itu maka secara otomatis bisa memberdayakan itu ratusan nelayan ya apa ini usulan aja karena ini dari usul tahun ke tahun ya hanya dirancang untuk kepentingan masyarakat aspirasi kita juga seperti ini ya.

Sekali lagi Pak Menteri, saya kira ini harus mudah-mudahan menjadi perhatian karena apapun juga yang kita buat selama ini karena sekali lagi budidaya air tawar tidak akan mungkin jalan karena keramba jaring apung tidak dimiliki oleh masyarakat. Nah kalau kita rancang, akhirnya juga tidak jalan, siapa yang mau disalahkan ya. Saya kira Kementerian *nggak* disalahkan, cuma yang di bawah ini tidak efek balik melapor. Bu Ani Maluku satu juta ekor, paling cuma berapa puluh ekor, paling tinggi 100.000 ekor, lalu *sembilan puluh* 900.000 dikemanakan? Jadi pertanyaannya ya. Sehingga ada yang tanya lagi, lalu 100, 900.000 tidak digunakan, apa langsung dianggap 100%, kan itu akhirnya juga jadi pertanyaan ya. Jadi memang sepele, tapi kalau dilacak-lacak ini juga bisa jadi masalah untuk setiap orang ya.

Jadi itu, Pak Menteri. Saya kira ini aja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan kita evaluasi bantuan-bantuan ini. Dan kalau dapat diberikan kewenangan aja untuk masih masing-masing Dapil dia menyusun, kalau udah menyusun Pak Menteri tidak ada yang komentar di sini lagi ya. Karena banyak salah di lapangan, itu adalah salah dari Anggota Dewan pihak tersebut ya, jadi enak ini aja lebih lebih bagus Pak Menteri.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik.

Terima kasih Pak Tuasikal, cukup?

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Siap Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Abdullah Tuasikal.

Kita lanjutkan berikutnya Pak Johan Rosikan, Rosihan, maaf, dari Fraksi PKS. Pak Johan silakan Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat ini,

Karena ini pembicaraan kita soal APBN mungkin kita bicara luar-luarnya saja, umumnya dulu. Adapun detailnya nanti para Pimpinan dan Kapoksi lah yang mendetailkan itu.

Karena itu, pertama. Saya ingin bicara tentang tema dan arah kebijakan Pak yang Bapak sampaikan di halaman 4 persentasi ini. Kita tahu bahwa pencapaian ketahanan pangan itu kan diamanatkan kepada Kementerian Pertanian juga kepada Kementerian Perikanan, tetapi ketahanan pangan itu tidak masuk menjadi tema RKP 2023 di Kementerian apa Kementerian Perikanan Kelautan. Coba bisa kita dijelaskan kenapa tema ketahanan pangan yang kemarin di pidato Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani, dalam pengantar APBN itu selalu menjadi fokus, tetapi Kementerian Perikanan ini tidak dijadikan sebagai tema dalam pencapaian target APBN 2023. Itu yang pertama.

Yang kedua, dari 5 arah kebijakan pembangunan sektor perikanan dan kelautan, KKP menurut saya masih berorientasi hanya kepada produksi saja ya, tetapi bagaimana hilirisasi, bagaimana peningkatan daya saing, itu masih menjadi kurang perhatian. Karena itu, bisa kita lihat dari postur anggaran yang diajukan ya, dari semua Dirjen yang ada itu masih didominasi oleh budidaya dan tangkap ini serta produksi, tetapi Dirjen Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan Ruang Laut dan lain sebagainya itu masih porsiya terlalu sedikit. Nah karenanya ini mungkin masih bisa dibicarakan gitu Pak, bukan hanya kita meningkatkan produksi, tetapi peningkatan daya saing perikanan kita gitu. Kan bisa kita lihat dari bagaimana nilai ekspornya gitu Pak, produksi kita jauh di atas Vietnam, tetapi nilai ekspornya Vietnam itu di atas kita. Ini menjadi PR.

Berikutnya yang ketiga adalah ya Pak. Kalau kita lihat tadi pidatonya Pak Bu Menteri Keuangan itu mau tidak mau ya mau tidak mau sepertinya *ndak* bisa lagi di di apa namanya kita kita kita nafikan bahwa BBM ini akan naik, kira-kira apa perencanaan Pak Menteri terhadap rencana kenaikan BBM itu terhadap aktivitas nelayan kita. Apakah dalam rancangan APBN kita ini sudah memasukkan faktor itu ya, nah jadi kira-kira umumnya begitu Pak.

Terus yang keempat. Saya minta dibuat laporan singkatnya gitu Pak, apa namanya soal perkembangan 3 program prioritas itu. Misalnya penambahan BNPB, apa, PNPB sudah berapa persen ya. Nah terus apa namanya Kampung budidaya berbasis kearifan lokal, gimana perkembangannya. Terus ke kampung nelayan maju, bagaimana kondisinya, bagaimana perubahan peningkatan apa namanya peningkatan kehidupan masyarakat sebelum ada program itu dan setelah program itu ada, biar kita bisa melihat dan bisa kita lanjutkan program itu. Kalau misalnya dia tidak merubah perilaku masyarakat, tidak merubah kesejahteraan masyarakat ya untuk apa kita memberikan uang yang besar di situ untuk kemudian dianggarkan di 2023.

Berikutnya Pak, kami meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan kebijakan perikanan terukur khususnya hasil yang sudah dicapai, berapa perbandingan produksi sebelum dan sesudah kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi.

Terakhir Pak, soal ada masukan dari pemerintah daerah di Dapil saya Pak soal tolong dibukakan menu DAK itu Pak menu DAK yang mungkin soal rumput laut, baik itu soal demplotnya, baik itu pembuatan para-paranya, baik itu soal perahu, pemeliharaan rumput laut. Nah, terus mungkin juga bisa digunakan untuk yang padat karya gitu Pak, yang padat karya untuk misalnya pembangunan jaringan irigasi tambak, rehabilitasi jalan-jalan produksi misalnya mungkin bisa dibuka menu untuk itu sehingga Kabupaten yang sudah tidak punya kewenangan perikanan yang kemudian berubah struktur APBD-nya itu bisa kemudian memperbaiki dan apa memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan kita.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Johan Rosihan.

Kami persilakan berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat, Bapak Suhardi Duka dan bersiap-siap Pak Ansi Lema setelahnya.

Silakan Pak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen,

Kita memahami benar bahwa anggaran kecil tapi kebutuhan banyak. Nelayan perlu dukungan kapal, solar subsidi, mina padi, alat tangkap, bioflok, debitur rumput laut yang berkualitas, Pelabuhan pendaratan, alat pengolah tambak, pupuk subsidi, pasar tradisional, dan lain-lain itu kebutuhan kita semua. Kondisi ini ya tidak bisa kita elakkan jika kita ingin melayani rakyat utamanya, kalau ingin menaikkan NTN (Nilai Tukar Nelayan). Di lain sisi kita diberikan anggaran yang kecil dan kita juga perlu mendorong penangkapan modern dengan regulasi yang lebih baik, peran swasta, dan penangkapan ikan modern yang bisa bersaing yang bisa mendapatkan PNBK. Begitupun terhadap perlindungan nelayan dan ruang laut kita agar laut kita betul-betul untuk Indonesia, bukan untuk para orang asing. 2023 kita hanya diberikan Rp6,1 triliun, memang kecil dibanding dengan pidato-pidato yang kita dengarkan selama ini, utamanya tadi Menteri Keuangan lagi pidato lagi ketahanan pangan di paripurna.

Saya ingin sedikit memberikan catatan terhadap rancangan 2023 ini, khusus untuk beasiswa, kajian, dan macam-macam yang administratif yang tidak jelas *output*-nya saya minta dikurangi dengan kondisi keuangan yang saat ini. Begitupun dukungan manajemen, semua Dirjen diluar gaji dan tunjangan dan operasional rata-rata masih di atas 10% dukung manajemennya, saya pikir ini terlalu besar biaya umum sampai dengan 10%, harusnya ya 5%, maksimal 7%. Dan contohnya Pak Menteri kita lihat di Dirjen Perikanan Tangkap, pagunya Rp955 miliar, gaji dan operasional itu Rp360 miliar, jadi sisa Rp595 berupa kegiatan, dukungan manajemennya Rp103 miliar itu 17,3%, saya minta ini menjadi perhatian kita agar anggaran yang kecil kalau di-*manage* secara efisien dan efektif juga akan menimbulkan dampak yang baik. Walaupun anggaran besar, tapi manajemennya tidak tepat sasaran, tidak menyentuh mendorong pertumbuhan dan sekaligus kesejahteraan nelayan, saya kira juga dampaknya kecil. Olehnya itu, baiklah kita terima ini anggaran Rp6,1 triliun, tetapi cara *manage*-nya yang harus lebih efisien dan efektif itu.

Begitupun terhadap DAK, penugasan diberikan pada daerah-daerah yang memang celah fiskalnya kecil, utamanya daerah-daerah yang memiliki laut, yang memang potensi nelayannya ada, tapi celah fiskalnya kecil, PAD-nya kecil. Olehnya itu, kita dorong untuk berikan DAK penugasan, tapi kalau sudah daerah yang sudah besar, celah fiskalnya banyak, ditambah lagi dengan DAK menimbulkan ketidakadilan. Jadi tadi apa namanya kriteria DAK saya lihat sudah cukup bagus, tinggal kita disini yang mengalokasikan itu. Bagian perencanaan di KKP supaya melihat, jenis-jenis perikanan yang memang kecil anggarannya yang hanya Rp300 juta *ndak* sampai Rp1 miliar, itulah barangkali yang prioritas diberikan kepada DAK itu supaya diberikan DAK penugasan, supaya bisa apa membantu daerah dalam rangka peningkatan peran perikanan di daerah.

Saya kira, ini tidak banyak kami Fraksi Partai Demokrat, karena kami juga ingin apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan kita kemarin supaya ditindaklanjuti dengan baik.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Selanjutnya Pak Ansi Lema dari PDI Perjuangan. Bersiap-siap Pak Edward Tanur dari Fraksi PKB. Pak Ansi, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih.

Pimpinan Pak Budi Djiwandono, Pak Sudin, dan teman-teman Komisi IV yang saya hormati, juga Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Pak Sekjen, dan para Dirjen serta jajarannya,

Pertama, saya membaca bahwa alokasi belanja Kementerian dan Lembaga untuk tahun 2023 ini besarnya hampir 1000 triliun angka persisnya Rp993,2 triliun. Anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,767 triliun kalau dihitung itu berarti 0,00068%, tidak sampai 0,01%. Ini potret keberpihakan APBN kita, postur APBN kita, terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya ingin tanya kepada Pak Menteri, idealnya itu menurut Pak Menteri mestinya KKP ini dapat anggaran berapa triliun dari alokasi belanja kementerian dan lembaga yang hampir Rp1000 triliun ini.

Yang kedua, saya langsung pada kesimpulan. Kalau melihat postur anggaran seperti ini, kita tidak bisa berharap banyak bahwa laut kita yang super kaya raya ini akan mampu memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita, lebih khusus kesejahteraan bagi masyarakat kecil utamanya adalah nelayan kecil dan tradisional. Maka saya tidak heran kalau KKP ini sulit sekali menunjukkan program-program yang berpihak kepada masyarakat kecil, program-program pemberdayaan masyarakat kecil, karena kembali anggarannya itu 0,00068% ini potret kita. Dalam realitas demikian, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat suatu ide untuk mengeluarkan kebijakan mengenai penangkapan terukur dengan sistem zonasi dan kuota, kabarnya akan direalisasikan pada 2023 nanti dan konon mau diujicobakan Agustus 2022 ini. Konsep ini diyakini oleh KKP akan meningkatkan PNBP, menjaga ekosistem laut, cadangan ikan, dan mensejahterakan para nelayan kecil tradisional.

Saya ingin kami ingin men-*challenge* soal kebijakan ini Pak Menteri, satu persatu. Pertama, kebijakan penangkapan terukur ini kata kuncinya yang perlu dipertanyakan adalah nelayan kecil tradisional nanti dapat apa? Kira-kira kebijakan ini bisa mengurangi angka kemiskinan nelayan kecil tradisional berapa persen? Negara kita dari PNBP ini akan dapat berapa Rupiah? Bagaimana menjaga kelestarian ekosistem laut dan cadangan ikan. Karena kalau kita baca, ini dari bulan Januari sampai Desember kalau orang sudah dapat kuota dan zonasi dia bisa menangkap ikan dari Januari sampai Desember, tidak ada masa katakanlah dalam tanda petik masa puasa.

Saya ambil perbandingan untuk tahun 2020 lalu Pak Menteri, disebutkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap nilai produksi Perikanan Tangkap pada 2020 itu sebesar Rp224,8 triliun, tetapi PNBP yang kita hasilkan realisasinya Rp600 miliar setara dengan 0,26%. Pertanyaannya, kemana yang 99,74% ini kekayaan laut kita? Saya jawab saja, tidak ke negara ini dan tidak ke masyarakat, ke korporasi besar. Jadi angka-angka seperti ini Pak Menteri membuat kami ini skeptis, kami agak ragu. Apalagi kemarin ketika Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara terbuka Pak Menteri menyampaikan bahwa ada beberapa hal terkait dengan peraturan dan juga kesiapan sarana dan prasarana menyangkut kapal pengawasan, menyangkut radar pengintai, yang belum sepenuhnya disiapkan untuk bisa mendukung pelaksanaan konsep penangkapan terukur ini. Dampak lanjutannya adalah *overfishing* di zona industri yang terus terang ini bisa mengancam kelestarian ikan dan ekosistem laut.

Kemarin Pak, saya sempat menyinggung soal kebijakan yang hampir sama secara substantif yang pernah diterapkan dalam kerjasama Indonesia dan Jepang yang namanya *Bandasi Agreement*, itu kebijakannya juga memberlakukan zonasi dan memberlakukan kuota Pak. Nah, penangkapan terukur ini konon katanya akan dilakukan pertama di WPP-NRI 718 Laut Arafura Maluku. Ini potensinya besar sekali disebutkan sebesar 21% potensi ikan ada di sana, setara dengan 2,64 juta ton pertahun tapi Arafura ini berada di Zona Ekonomi Eksklusif dan kapal-kapal yang boleh masuk kesitu hanya 100 Gross Ton dibawah itu tidak boleh masuk. Kami sudah melihat Pak, yang bisa beroperasi di situ hanya kapal-kapal milik Cina, Korea Selatan, Amerika

Serikat, dan Taiwan, kapal-kapal dibawa 30GT itu tentu tidak bisa akan masuk di situ. Kalau saya salah nanti tolong diluruskan Pak Adin dan juga Pak Zaini, ini kita diskusi, karena saya lihat Bapak berdua dahinya mulai berkerut nih.

Jadi dari *Bandasi Agreement* ini terus terang Pak kita melakukan kerja sama ini dari tahun 1969 sampai 1980, evaluasinya kita rugi dalam bekerjasama dengan Jepang ini. Pertanyaannya, kalau dari segi substansi kebijakan penangkapan terukur ini persis sama dan sebangun dengan kebijakan *Bandasi Agreement*, kenapa sekarang kita mau melakukan hal yang sama ini? masyarakat awam itu melihat, ini sama seperti menjual izin Pertambangan di darat, dijual izinnya, dikasih zonasi dan boleh menambang. Di laut yang terjadi adalah kavlingisasi, yang dikawatirkan nanti korporasi-korporasi besar pestapora Pak, sementara PNBP-nya yang masuk ke kita tidak, dari aspek keadilan *fairness, justice*, itu sangat jauh.

Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin kita butuh jawaban Pak. Nelayan kecil tradisional, terus terang Pak Zaini, saya kalau lihat Pak Zaini, saya minta kami minta ketinting aja Pak Zaini tidak pernah memenuhinya. Kami akhirnya berpikir, saya terutama berpikir Pak Zaini, Pak Zaini ini hanya peduli pada korporasi besar, kepada nelayan kecil tradisional *nggak*, buktinya tidak kasih ketinting, untung Pak Menteri kemarin sudah tegas mengatakan nanti ada, syukur Puji Tuhan, syukur *Alhamdulillah*, itu yang pertama Pak.

Yang kedua, Erfan tolong tampilkan foto sedikit, ini ada foto Pak Jokowi pergi ke Indonesia bagian selatan di Rote Ndao. Setelah Pak Jokowi ke sana, pulang, Pak Menteri, Pak Zaini, Pak Adin, Pak TB, kalau tidak salah dengan Ibu Dirjen pergi ke sana, saya dikasih tahu sama masyarakat Rote Pak, mereka bilang, aduh kami senang Pak Menteri baik sekali senyum terus, Pak Dirjen juga, kita cerita makan enak di sini. Saya tanya ke mereka, pulang Pak Menteri kasih kalian apa? Belum ada kakak eh tapi tidak apa-apa Pak Menteri sudah datang berkunjung ni kita pung kampung. Saya konkret aja Pak Menteri, Pak Zaini bisa *nggak* itu PP itu (*suara tidak jelas*) itu Pak, itu kapal *nggak* bisa masuk itu batasnya langsung Timor Leste dan Australia itu batas lautan Pak, bisa *nggak* Bapak tolong keruk lah disitu Pak. Masa' Bapak mereka sudah jauh-jauh sampai ke sana, Pak Jokowi sudah cuci muka pakai air dari Rote Ndao dari kampung saya itu, masa *nggak* ada sih yang tersisa.

Perikanan Budidaya saya mohon nih, Pak Menteri saya mohon betul. Pak, di sana ada Laut Mati Pak, ada Laut Mati. Itu Bapak kalau kembangkan Perikanan Budidaya, Nila Salin, itu top bener Pak, itu keberpihakan KKP orang langsung lihat, gila untuk Indonesia bagian timur kuat banget.

Untuk Ibu Daya Saing, mungkin tolonglah dibantu sistem rantai dingin. Saya minta kita minta *nggak* banyak-banyak kok, tapi perlu ada keberpihakan.

Yang terakhir Pak, Pak Menteri, Pak Sekjen. Kalau boleh, di setiap kementerian itu dalam penyusunan pagu anggaran perlu menampilkan paradigma kebencanaan, perlu ada anggaran mengenai bencana. Mengapa? Karena Indonesia ini negara supermarket bencana, bukan saya yang katakan, para ahli, mulai dari banjir, tsunami, longsor, macam-macam. Dan ketika

bencana terjadi Pak, tambak hancur, perahu rusak, hanyut, nelayan rugi Pak. Contoh ketika Badai Seroja di NTT, itu banyak nelayan itu yang menderita Pak karena laut mereka, alat tangkap mereka, perahu mereka udah rusak, tapi kalau karena kementerian ini tidak memberikan anggaran dalam pagunya akhirnya kemudian juga tidak bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Padahal, amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana itu jelas, pemerintah pusat harus turun tangan untuk itu.

Yang terakhir, soal BBM bagi nelayan tolong ini mungkin diperhatikan. Pak Ketua tadi dalam Rapat Paripurna ada teman dari fraksi, saya lupa fraksi apa tadi ya, sempat bicara mengenai kembali lagi pupuk untuk pupuk bersubsidi untuk para petambak. Mereka bicara lagi itu, dan ada sedikit nada *warning* ini akan terjadi demonstrasi atau apa begitu, kira-kira seperti itu Pak.

Sekian, terima kasih Pak Menteri. Lebih dan kurangnya saya sampaikan terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ansi.

Apa yang dikatakan oleh Pak Ansi itu benar. Periode lalu terjadi bencana bencana tsunami di Lampung Selatan yang menghancurkan cukup banyak tambak-tambak, termasuk pulau-pulau kecil. *Alhamdulillah* dari Kementerian semua datang, Kementerian KKP, setelah datang, pulang, *goodbye*. Itu Menteri yang lalu, periode yang lalu, bukan 2019, bukan, yang lalu. *Nggak*, ini supaya jelas, mungkin orangnya pun yang datang ke sana masih ada disini mungkin, ya saya mengatakan harus jelas. Makanya tadi apa yang dikatakan, ada cadangan untuk bencana, ninjau, wah kecamatan ini kecamatan ini termasuk dengan saya juga ninjanya, setelah itu wasallam gitu.

Silakan Pak Budi, lanjutkan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Edward Tanur dari PKB, silakan Pak.

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Baik.

Selamat sore untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV beserta Anggota Komisi IV, Bapak Menteri beserta jajarannya,

Terima kasih banyak, sore ini kita masih bisa berkumpul. Walaupun materi yang akan saya sampaikan tidak banyak-banyak amat, tapi bermanfaat kalau dijalankan, kalau *nggak* dijalankan sama aja bohong ini kita. Jadi apa

yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya menyimak secara pelan, teliti, memang masih banyak kekurangan ya, salah satu penyebabnya anggaran yang minim. Tapi sudahlah, yang sudah dianggarkan itu tolong dipercepat supaya apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat tentang bantuan-bantuan itu bisa cepat turun dan bisa cepat mereka kerjakan. Karena ini kita ngomong bilang krisis pangan, 50 negara sudah krisis pangan mau bangkrut, kita ngomong doang, tapi rakyat kita juga sekarang sudah krisis, hanya belum meledak aja ini sekarang. Jadi kita coba kita fokus, kita konsentrasi.

Mungkin, saya mau sampaikan sedikit lagi mohon maaf Pak TB, kalau bisa budidaya ikan air tawar itu bibitnya bibit ikannya cepat dijalankan sudah karena tahun lalu kita gagal, ini saya hanya memberikan masukan ya. Tahun ini belum sama sekali nih, padahal ini sudah mau bulan September, karena dalam rangka *supply* ikan benur ini benur apa bibit ikan ini sangat rawan dan sangat peka, jadi jangan sampai kita gagal lagi untuk yang kedua kali. Saya juga sudah bosan orang main tagih terus, Pak Dewan, itu bibitnya kapan datang? Saya bilang sabar, sebentar lagi sebentar lagi, ini sebentar sudah mau berakhir tahun kedua barang itu belum ada. Mungkin ada kesulitan apa, tolong disampaikan, supaya kita bahas bersama. Kalau *nggak* kan sayang, ini kita cuma janji-janji, tapi janji palsu semua, ini memang susah.

Dan juga saya melihat, saya beri apresiasi mengenai rencana kerja dalam mengelola perikanan budidaya, saya setuju bahwa ini jalan pemikirannya benar pengadaan alat ekskavator ini betul, itu alat sangat dibutuhkan dan benar ini cara berpikirnya oke ini sehat dan memberikan harapan dan sangat menjanjikan. Karena banyak lahan-lahan kita terlebih di daerah-daerah yang punya sumber, air itu tidak dikembangkan budidaya ikan karena kesulitan peralatan. Mereka kalau disuruh gali pakai linggis, artinya nanti ibu-ibu yang repot, pulang pinggangnya sakit semua itu nanti. Jadi tahu sendiri tahu kalau Bapak pinggang itu sakit dia melenggang di situ dia tidak mau tahu lagi apa pula yang terjadi terjadilah, jadi itu ada berhubungan juga dengan program KB juga nanti.

Jadi saya mohon supaya kegiatan-kegiatan yang sudah diplotkan di sini secepatnya dijalankan seperti. Pak, kami ini bukan ego wilayah ya, NTT ini kan daerah tertinggal, termiskin lagi, terluar lagi, sekarang ditambah busung lapar lagi, ini kalau slogan makan ikan cerdas, makan ikan kuat, makan ikan sehat, tapi ikannya *nggak* kelihatan ini. Kalau kita hanya kasih bantuan sembako, makan paling lama 2 hari mungkin habis, jadi kita harus menjamin sumber daya atau potensi potensi makanan ikan ini makan ikan ini harus tersedia betul baru kita bisa bangga akan program-program ini.

Dan juga mengenai penyiapan kendaraan *coolbox* atau *freezer* itu kendaraan *freezer* itu, itu betul-betul harus diperhitungkan secara baik agar disesuaikan dengan medan, medan yang ada kondisi di lapangan dengan sangat baik. Kalau di Jawa sih oke, tapi kalau di luar pulau tuh sangat susah kalau kendaraannya tidak memiliki *double gardan* atau *Four Wheel Drive* itu susah sekali Pak. Kami saja turun ke lapangan untuk sosialisasi atau kampanye harus *Four Wheel Drive*, kalau tidak ya kita siap 1 pasukan 1 track

di belakang untuk dorong dan tarik nanti, jadi pengalokasian alat harus sesuai betul-betul dengan medan. Mungkin ya saya tidak menuduh, mungkin informasi dari daerah terpencil, daerah-daerah terluar masih kurang untuk KKP. Terus terang Pak, kami melakukan komunikasi dengan Dinas Perikanan di daerah sangat sulit sekali, padahal setiap tahun dikasih Bimtek, tapi begitu dia minta ku suka, dia kasih bukan ku suka, dia kasih dia suka. Jadi suratnya bukan ku suka yang dikeluarkan itu surat-surat untuk memberikan kelompok perikanan itu, tapi yang dia kasih dia suka, jadi kita tunggu sampai bego aja ini. Jadi ini yang perlu koordinasi secara baik Pak Menteri, kami apa yang kami alami kami sampaikan ke Pak Menteri, jadi jangan kurang hati, karena ini semua kita bekerja untuk Republik ini Pak Menteri. Biarlah dengar kami Anggota DPR ini sedikit lah karena kami juga di Dapil kami, kami sangat menguasai keadaan di daerah kami, atau Pak Menteri *nggak* percaya coba tanya di NTT kenal Edward Tanur apa *nggak*, tanya aja. Kalau kenal, nah itu oh berarti orang ini tukang jalan ini orang ini, tukang keliling, jadi begitu. Jadi aku ini tidak mau membual dan kami tidak mau mengada-ada, apa yang kami rasa perlu.

Dan satu lagi Pak Menteri, mengenai pemeliharaan mangrove atau penanaman mangrove di pesisir. Pak, saya usul, kalau bisa berdayakan kepala desa saja, kita bentuk kelompok-kelompok, percuma, kepala desa sehingga ada kerja sama dengan Pemda (Pemerintah Daerah) setempat karena ini kelihatannya pemerintah daerah mungkin *nggak* kebagian rejeki maka dia merasa bodoh saja. Habis tanam, persetan di situ mau bilang laut mau pasang surut, kekeringan dia *nggak* pusing, apalagi bila mau pemecah gelombang pakai bambu lagi wah dia tarik buat kayu api saja. Ini saya baru dengar pemecah gelombang pakai bambu ini teknologi baru ini saya bilang ini, wah ini ini bisa kasih bukan S3, S5 ini nanti. Jadi ini bukan, iya mau ramah lingkungan tapi fungsinya tidak tercapai untuk apa, malah bikin kotor lingkungan lagi nanti.

Jadi, kelihatan bahasa-bahasa yang saya sampaikan ini bahasa-bahasa lapangan yang disampaikan oleh masyarakat kita di pedesaan. Yang paling penting itu mereka diberdayakan, cara mereka ini kan nelayan ini serempak, satu hari paling tangkap ikan 10000 cukup untuk makan dengan keluarga, jadi tolonglah perhatian itu kalau memang mau pemerataan pembangunan tolonglah di daerah-daerah terpencil daerah-daerah terluar lagi agar mereka semakin yakin bahwa bersama NKRI kita merasakan kesejahteraan. Apalagi kami daerah perbatasan, Timor Timur, daerah terluar lagi. Jadi, ini mungkin Pak Wamen juga pernah bertugas di NTT, jadi Pak Wamen tahu persis kehidupan orang di sana. Jadi ini bukan curhat juga, tapi penyampaian supaya kita sama-sama membuka mata, membuka otak, buka hati, buka pikiran, baru hari ini saya bicara di sini.

Saya, terima kasih. Mungkin yang lain-lain teman-teman sudah sampaikan, saya *nggak* usah bertele-tele lagi. Tolonglah anggaran yang sudah diplotkan segera dijalankan sehingga bisa masyarakat menikmati.

Terima kasih banyak. Cukup, Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Edward.

Sebelum kami mempersilakan Pak Menteri untuk menanggapi masukan, pertanyaan dari Anggota, sudah ada beberapa Anggota yang ingin melaksanakan pendalaman. Saya usul, kita persilakan bagi yang mau mendalami dulu.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Saya daftar Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Hanan juga daftar, tapi tunggu yang ini dulu ya. Nanti, nanti setelah yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah daftar, setelah itu Pak Hanan. Saya minta, Pak Alimin sudah ada. Saya minta Bapak/Ibu yang untuk pendalaman ya langsung *strict to the point* narasinya kalau bisa *nggak* usah panjang-panjang, apa yang ingin disampaikan apakah itu masalah apapun silakan. Kami persilakan yang pertama Pak Daniel Johan, siap-siap setelah itu Ibu Saadiah Uluputty.

Silakan, Pak Daniel.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Iya. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, segenap Anggota, Pak Menteri dan segenap jajaran,

Yang pertama Pak Menteri, Pak Sekjen di Dapil mungkin *nggak* hanya Dapil saya, itu banyak sekali yang berteriak mengenai kelangkaan BBM. Ini menjadi keluhan nelayan hampir di semua daerah, jadi kita minta mungkin ada langkah-langkah terobosan karena ini menyangkut masa depan dan tingkat produktivitas nanti ya, kalau misalkan seluruh kapal tidak melaut itu akan punya dampak terhadap inflasi, terhadap ketersediaan ikan, termasuk terhadap pendapatan dari masyarakat nelayan.

Yang kedua mengenai, nah ini yang perlu diperjelas. Semua kalau ini bukan hanya nelayan, tetapi Kadis-kadis di Dapil saya pun mereka mempertanyakan dan merasa bingung yaitu mengenai wacana penangkapan terukur yang sampai saat ini belum jelas aturan teknisnya, bahkan aturan belum jelas ada informasi terbaru ada perubahan menjadi perizinan khusus ya. Jadi mungkin perlu dijelaskan dan perlu diambil sikap yang tegas sehingga ada ada ketegasan, agar sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan itu bisa berjalan dengan baik.

Yang ketiga, kemarin saya melakukan Bimtek mengenai BLU yang ternyata responnya sangat baik dari KKP eh dari masyarakat nelayan. Tetapi memang sosialisasi dari KKP sangat kurang ya sehingga kita mendorong dari LPMUKP itu bisa lebih aktif menjemput bola, memberikan sosialisasi penjelasan kepada nelayan, sehingga bahasa gampangya kan kredit usaha rakyat yang murah untuk nelayan itu bisa berjalan dan bisa menjadi daya kekuatan untuk menggerakkan sektor perikanan.

Keempat, kami membaca terkait pinjaman luar negeri KKP itu ada sekitar 12 peminjam. Nah, yang kita ingin tanyakan adalah mekanisme peminjaman dan pengembalian PLN tersebut itu seperti apa ya dan termasuk jangka waktunya dan sistem pengambilalihan semua.

Terakhir, mengenai bantuan kapal yang banyak tidak terealisasi Pak Menteri. Tahun ini termasuk yang tahun lalu kita saya banyak ditagih nih oleh para nelayan di basis, terutama juga *support* nelayan yang terdampak bahasa kasarnya tergusur oleh pembangunan Pelindo yang di Pelabuhan Kijing itu untuk nelayan tangkapnya itu nasibnya masih tidak jelas. Jadi mohon bisa dikawal bersama, agar mereka punya jalan keluar, alternatif untuk kapalnya ya.

Demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Daniel.

Singkat, jelas, padat. Selanjutnya Ibu Saadiah Uluputty, kami persilakan Bu, sama kayak Pak Daniel, singkat, jelas, padat. Siap-siap Bu Yessy Melania.

Silakan Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih Pak Budi, Pak Ketua kita Pimpinan Sidang hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pak Menteri beserta para jajaran, Pak Sekjen, para Dirjen, Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Yang pertama, Pak Menteri saya men-*highlight* ya mencermati soal kebijakan penangkapan terukur Pak Menteri. Jadi kebijakan penangkapan terukur yang disampaikan dipaparkan pernah oleh Pak Menteri itu di Hotel

Ayana ya kalau tidak salah, kami menunggu ada aturan-aturan teknisnya sebelum direalisasikan. Beberapa masukan-masukan saat kunjungan kami ke beberapa daerah khususnya di daerah-daerah WPP 715 dan 718 yang akan diberlakukan penangkapan terukur, terus terang para nelayan kita agak sedikit gusar. Mereka khawatir dan mempertanyakan, apakah kebijakan penangkapan terukur yang disampaikan itu adalah seperti konsesi kehutanan atau konsesi pertambangan. Apakah kebijakan penangkapan terukur itu adalah ruang yang diberikan kepada investor seluas-luasnya, maka mereka mempertanyakan dimana ruang untuk kapal-kapal dibawah 30GT dan nelayan-nelayan kecil, nah ini juga harus diperjelas.

Kita tidak anti investasi selama *bestline* kita, sarana prasarana kita, untuk bisa mengawal jalannya kebijakan dan jalannya investasi-investasi para investor yang akan mengeksploitasi sumber daya alam kita. Khususnya laut kita itu benar-benar kita pastikan telah siap, kalau tidak orang Ambon bilang akan jadi ikan makan, ikan makang Pak, umpanlah istilahnya ya. Apakah dermaga-dermaga yang tersedia di sana sudah dilengkapi dengan sistem kontrolnya, bagaimana dengan kesiapan PSDKP kita, karena apa? Kita sedang membuat dan membuka kontrak kepada investor yang mengeluarkan modalnya uangnya yang tidak sedikit untuk bisa menggarap laut kita, dalam jangka waktu panjang lagi yang saya tahu 30 tahun. Betul ya Pak Zaini ya? kira-kira seperti itu Pak yang saya tahu ya. Nah, kita perlu ada kejelasan agar tidak terjadi simpang siur berita di lapangan, terutama kami Pak, saya dari Maluku yang WPP 718 dan 715 juga masuk di dalam kebijakan penangkapan terukur. Yang kami harapkan kepedulian, perhatian dari kementerian, Pak Menteri mohon maaf adalah bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat soal bagaimana prasarana tangkap. Mereka tidak minta yang muluk-muluk, Pak Ketua, bodi pancing tonda apa namanya perahu ketinting, sampai menangis ibu-ibunya itu tuh datang menemui saya, tapi saya tidak tahu harus menyuarakannya kemana begitu. Nah, kalau misalnya ada Pak Menteri, mungkin dalam MLIN ini terima kasih ya sudah mengalokasikan anggaran Rp109 miliar ya Pak Menteri ya kami mengucapkan terima kasih dalam APBD APBN 2023 pemerintah dalam hal ini Kementerian KKP mengalokasikan sekitar Rp109 miliar untuk MLIN. Nah, saya perlu tanyakan soal regulasinya Pak Menteri sudah sejauh mana, karena regulasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan MLIN ini dia akan jalan sebagaimana mestinya.

Yang kedua, bagaimana koordinasi dengan Kementerian terkait Menko Marves, kemudian juga Kementerian Perhubungan. Nah, di sini misalnya ya di rincian rencana kerja DJPT.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu Saadiah, bisa dipersingkat Bu?

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Sebentar Pak Ketua, saya dalam sedikit saja ini soal MLIN.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya, Ibu sudah hampir 6 menit ya.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tolong sedikit lagi, kalau bisa *last point* aja Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya. Ini Perencanaan Amdal Pelabuhan Perikanan Salahutu MLIN, Pak ini di Amdalnya ya, apakah dia masuk di tupoksinya KKP atau bagaimana. Kalau tidak, baiknya saya usulkan untuk sarana prasarana tangkap Pak Menteri, ini kan langsung ditujukan Rp2 miliar ya kalau tidak salah di situ untuk Amdalnya ini saya mengusulkan baiknya untuk hilirisasi ataupun sarana prasarana di apa daya saing lah ya banyak yang misalnya masyarakat membutuhkan untuk *cold storage* apa namanya portabel ya. Kemarin waktu ke Pulau Buru, kita Bimtek di sana, masyarakat juga mengusulkan dan saya sudah langsung menyampaikan ke Bu Tati ini harap menjadi catatan.

Yang terakhir Pak Ketua, soal DAK untuk Kabupaten. Pak Menteri, saya mempertanyakan kenapa di Provinsi Maluku hampir semua Kabupaten/Kota dari 11 Kabupaten, 8 Kabupaten tidak ada alokasi DAK 2023, Pak. Saya ditanyakan Pak setelah apa kemarin reses ke beberapa Kabupaten dan mereka juga menitipkan proposal kepada saya, harap bisa diterima. Ada 2 proposal dari Kabupaten Buru berturut-turut dan juga Kabupaten Seram Bagian Barat Pak DAK dimana ya harap juga dialokasikan.

Yang terakhir soal penyuluh Pak Ketua, ini penyuluh perikanan kita selalu kita sampaikan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu, Ibu sudah selesai. Saya ingatkan terakhir kali Bu ya, Ibu udah 7,5 menit nih. Tadi saya minta *strict to the point* apa penyuluh, silakan langsung.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Oke. Iya, terakhir penyuluh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Soal penyuluh Pak Ketua. Ditambah alokasinya untuk apa daerah-daerah khusus daerah kepulauan dan perikanan untuk kebutuhan apa penyuluh kita ini masih sangat kurang sekali, bahkan berbasis kecamatan juga kita tidak mencukupi tidak ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak ada penyuluh.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita lanjutkan ya beberapa pendalaman, tapi kalau boleh ya masalah penangkapan ikan terukur ini kalau ada yang nanti masih mau bicara lagi tolong ya *strict to the point* disampaikan saja. Di Dapil saya masih ada permasalahan orang masih bingung masalah penangkapan terukur ini *nggak* apa-apa, tapi kalau bisa kita lebih singkat, lebih jelas, mungkin saya usul konkrit. Kalau tidak salah beberapa waktu lalu pernah ada FGD terkait penangkapan ikan terukur ini, kalau perlu ya kita minta mungkin adakan sekali lagi. Biar cepat gitu loh, biar kita semua ngerti, saya minta nanti semua harus hadir, wajib hadir untuk FGD tersebut.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Budi, sebentar. Menurut saya yang paling penting untuk diajak bicara itu adalah masyarakat nelayan di Maluku sana, mereka itu *stakeholder* utama. Kita juga oke, silakan, mau diskusi atau apapun. Tetapi tolong masyarakat Maluku ini didengarkan suaranya.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik.

Terima kasih Pak Ansi.

Nanti kita kondisikan ya semoga bisa untuk supaya semua jelas, tidak ada tanda tanya lagi ya kita sebagai wakil rakyat pun bisa menjelaskan kepada konstituen apa sih konsep perikanan terukur ini, seperti apa. Ya, supaya tidak ada kebingungan dan kegelisahan lagi semua *stakeholder* di sana ada.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

Tidak lebih dari 1 menit.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oke, Bu. Silakan Bu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya pikir semua yang sudah disampaikan dari fraksi per fraksi, poksi per poksi ini sudah lengkap dan jelas. Adapun yang tidak jelas, kita jelaskan nanti di FGD. Kalau memang seperti itu, saya pikir kita fokus aja kan kita pasti ada rapat RDP itu kan pendalaman, sama Pak Menteri ini hanya sekedaranya saja penyampaian. Mohon maaf Pak Menteri walaupun Pak Menteri senyumnya agak tipis-tipis, tapi saya paham.

Jadi menurut saya kita mendalami ini di RDP saja dan kalau memang ada lagi yang panjang kita bahas FGD, bila perlu semua Eselon kita FGD kan ini Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya, mungkin seperti itu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Konkret aja itu Ketua. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Bu Alien.

Tapi ini udah ada yang memang nulis namanya di sini, *nggak* enak juga kalau kita *nggak* kasih waktu Bu Alien. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu, saya persilakan Bu Yessy, setelah itu siap-siap Pak Sutrisno.

Terima kasih.

F-P.NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik.

Terima kasih Ketua.

Ketua, dan, harus berbeda ya? Luar biasa Alien ini mengingatkan.

Pak Ketua, dan Pak Menteri beserta jajaran dari KKP yang saya hormati,

Saya langsung saja karena sudah di *warning* masalah waktu. Yang pertama, saya mau mengkroscek yang di halaman 9 Pak Menteri. Di sini ada pagu tentang tema RKP tahun 2023, tapi ini kan ada di *break down* beberapa PN sampai 7 itu kalau di total tidak sesuai dengan pagu Rp6,767 T itu. Nah ini nggak tahu apa saya yang kurang membacanya atau apa, ini mohon penjelasan.

Kemudian terkait DAK, tadi saya melanjutkan dari Bu Saadiah. Memang DAK ini menjadi isu di daerah yang sangat-sangat sensitif dan setiap kali turun ke daerah kami selalu mendapat titipan persoalan ini. Kalau boleh saya mengusulkan nih Pak Menteri, Pak Sekjen terkait DAK di halaman 22 kita bisa lihat bersama yang untuk Provinsi itu ada salah satu Provinsi yang harus bercirikan kepulauan untuk penerima DAK dan fokus utama DAK. Nah mungkin di sini saya mau mengingatkan bahwa sekali lagi potensi perikanan di Indonesia itu tidak hanya di sektor kelautan, karena kalau kita bicara kepulauan ini kan identik dengan laut yang luas. Nah gimana untuk daerah seperti misalnya Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya yang minim laut? (*suara tidak jelas*) nggak ada laut kakak, adanya sungai, tapi kita punya potensi perairan umum darat yang luar biasa. Nah ini perlu ditambah di sini supaya teman-teman di luar provinsi yang punya laut juga punya istilahnya bisa bernafas lega gitu lho, mereka masuk kategori Provinsi prioritas untuk DAK.

Yang untuk Kabupaten juga sama, kita lihat di poin ketiga itu ada sentra Kelautan dan Perikanan. Mungkin bisa ditambah Kabupaten yang memiliki potensi perikanan endemik dan punya nilai ekonomis tinggi, ya Pak Sekjen, Pak Sekjen sudah angguk-angguk tandanya setuju ya. Karena, jujur di luar Jawa, itu di Kalimantan di Dapil saya terutama saya *nggak* pernah lupa, sebut Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu punya potensi perikanan yang luar biasa, ikan hias, ikan endemik yang 1 kilo aja tuh bisa jutaan rupiah Pak Ketua harganya ini ikan semah Pak Sekjen sudah pernah nyicip enak kan? Nah itu.

Kemudian yang berikutnya sedikit pendalaman izin Pak Ketua di DJPB Pak TB. Saya mau mengevaluasi terkait bantuan benih dan indukan dari 2020 sampai sekarang untuk yang program indukan saya nol realisasi sampai sekarang belum pernah dan yang untuk bibit yang benih sekian juta benih itu juga belum pernah, belum terserap. Bukan salahnya dari kami atau dari kelompok atau dari daerah pengusul, tapi karena di situ keterbatasan mungkin UPT-nya yang belum ada, Balai Benih ikannya belum maksimal. Nah mungkin bisa didorong gimana nih dari KKP terkait UPT, karena kami masih nginduk juga ke Kalsel. Dan setiap kali rapat juga selalu dibahas ya Pak Ketua, masalah Kalimantan ini juga rentang rantai pasok benihnya juga panjang ya Pak TB jadi perhatian serius.

Kemudian PSDKP, terkait Bimtek Pokmaswas. Nah ini kemarin kan baru dimulai nih sepertinya Bimtek Pokmaswas dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari daerah, dari teman-teman Pokmaswasnya, karena di daerah kami ini kebetulan memang daerah yang potensi banyak sungai, di sana perlu digiatkan lagi pelatihan-pelatihan seperti ini karena habitat masyarakat di sekitar kawasan sungai itu sudah mulai macam-macam gitu. Jadi mengambil ikan bukan lagi di jala, di pukat, lain sebagainya, tapi sudah menggunakan alat-

alat yang seperti sentrum. Nah sentrum itu kan bukan cuma ikan besarnya aja yang mati, tapi jentik ikan yang baru mau mau apa ya masih telurnya juga udah mati. Dan bahkan kadang bukan cuma ikannya yang mati, tapi masyarakat orangnya yang nyentrum ikannya juga ikut jatuh kalau ke sungai itu juga mati kena sentrum, nah ini perlu perhatian serius juga.

Dan di khusus PRL. Catatan saya, selama ini rasanya PRL itu kurang komunikatif atau kurang melibatkan Komisi IV dalam setiap program-program kerjanya karena saya *nggak* tahu apakah karena saya pribadi memang Dapilnya bukan yang bersinggungan dengan laut, karena ini identik dengan penata ruang laut. Tapi saya sedikit iri Pak Pak Dirjen, karena di situ ada misalnya program-program terkait bulan cinta laut, kenapa *nggak* ada bulan cinta sungai gitu, kan kasihan sungai-sungai yang punya potensi itu diabaikan. Misalnya kita, nanti Pak Dirjen sekali-sekali ikut saya ke Dapil, gimana tuh ngelihat daerah Kalimantan masyarakat yang masih hidup di pesisiran sungai yang tangganya itu langsung ke sungai dan Bapak/Ibu bisa bayangkan kotornya sungai itu seperti apa dan sampah itu langsung dibuang ke situ aja. Jadi saya pikir juga perlu ada program stimulus dari PRL untuk di luar laut gitu, entah nomenklaturnya atau seperti apa yang diubah.

Dan terakhir juga terkait nelayan Indonesia yang ditangkap di Papua Nugini, ini juga konsen kita gimana kita sebagai Kementerian terkait dan mitra itu punya beban dan tanggung jawab moral terhadap itu. Memang ini urusannya Kemenlu juga, tapi tidak lupa kita sebagai salah satu Kementerian yang melahirkan program-program pendampingan terhadap nelayan kita. Apa ada yang salah atau ada yang perlu kita kroscek, mungkin Bimtek, pelatihan, edukasi untuk masyarakat nelayan kita.

Sekian Pak Ketua.

Terima kasih untuk waktunya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Bu Yessy.

Kami lanjutkan, Pak Sutrisno. Untuk siap-siap, Pak Alimin.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Pak Menteri dan jajaran,

Langsung saja pada RKA Pak Menteri, RKA 2023. Bahwa RKA KKP dari Rp6,1 triliun akhirnya dapat Rp6,7 triliun dengan tambahan Rp663 miliar yang akan diperencana kalau saya adalah petunjuk dari Menteri Keuangan sama Bappenas uang itu, itu diperuntukkan untuk peningkatan produksi pangan dari

sektor perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan. Saya membaca di halaman 13 dan 14 justru semua Eselon I itu tidak menuju kesana, anggarannya sesungguhnya bisa untuk apa namanya bisa DAK, bisa pada anggaran-anggaran lainnya itu. Oleh karena itu, usulan saya sesuai dengan amanat pemerintah anggaran-anggaran itu dikhususkan dalam rangka meningkatkan produksi sekaligus untukantisipasi atau terhadap krisis pangan kita, juga dalam rangka memberdayakan masyarakat di bawah dalam rangka sebagai sebagai katup pengaman dalam rangka penguatan ekonomi kita. Itu usul saya Pak Menteri.

Yang kedua, dalam untuk menguatkan bahwa apa namanya kebijakan perikanan terukur ini tentu ada pendalaman, bukan hanya masyarakat di Maluku, kami juga perlu tahu dan supaya juga bisa memberikan penjelasan bisa memberikan pengawasan ya. Kenapa? Di dalam RKA 2023 bahwa rencana itu sudah teranggarkan, sebut saja di Dirjen Perikanan Tangkap, di Dirjen apa namanya PSDKP itu. Anggarannya dari 9 dari apa namanya *tujuh ratus sembilan puluh dua* yang sudah meningkat menjadi *sembilan ratus lima puluh lima koma sekian miliar*. Di PSDKP dari *sembilan ratus dua puluh tiga koma tujuh* menjadi *satu koma satu lima*. Pemanfaatannya Ditjen Perikanan Tangkap, untuk implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Kemudian di Dirjen PSDKP untuk operasional pengawasan, pengawasan kapal pengawas, untuk juga pengadaan kapal, nah realisasinya itu. Kemudian hasilnya, ini sudah mulai timbul dampak, dampak keluhan nelayan bahwa ruang dia untuk mendapatkan ikan dibatasi. Nelayan sudah mulai ditangkap, ditangkap oleh aparat penegak hukum, ditangkap oleh PSDKP karena ada kapal-kapalnya di luar apa namanya 12, 12 mil ini, ini belum apa-apa sudah terjadi reaksi seperti itu. Nah, oleh karena itu dari Komisi IV bahwa kebijakan itu akan menabrak menabrak peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat kita. Oleh karena itu, mendesak Pak Pimpinan, ini untuk didalami lagi apakah bentuknya apa namanya FGD lagi itu silakan bagaimana keputusannya ya.

Kemudian yang ketiga, yang ketiga. Di apa namanya budidaya ikan sama Ditjen Penguatan Daya Saing produk. Di budidaya perikanan itu objeknya adalah dalam rangka apa namanya untuk pengembangan perikanan budaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan, dan rumput laut. Ada persoalan Pak Menteri, mungkin juga Pak Menteri sudah tahu. Di Pati itu nelayannya sudah ngeluh nih, yang tahun kemarin 150.000 per kilo sekarang hanya Rp15.000 sampai dengan Rp30.000, ini kan persoalan. Di sisi lain dari Dirjen Daya Saing program tahun 2023 antara lain promosi produk skala internasional. Pertanyaannya adalah kenapa itu terjadi? Sedangkan kita juga memasarkan keluar, tapi produk kita akan ditingkatkan, tapi yang diproduksi di di ditangkap oleh nelayan dari laut saja *nggak* bisa dijual. Jangan kemudian harga bagus, tapi petani tetap saja tidak bisa menikmati harga itu.

Yang terakhir yang keempat, Pak Menteri. Pemerintah dengan susah payah di Dapil saya ada Waduk Jatigede, ini masih berdampak sampai saat ini. Awal jadinya Waduk Jatigede dimanfaatkan untuk budidaya ikan, ribuan ton dihasilkan, dan rakyat yang terdampak punya ruang kehidupan, sekarang tidak diperkenankan. Nah oleh karena itu, mohon bantuan Pak Menteri karena

masalah bukan kebijakan Menteri KKP aja ini, kaitannya dengan Menko Ekuin, kaitannya dengan juga PUPR itu. Kalau itu tidak boleh pakai jaring apung, tolong dicarikan solusi lain, supaya rakyat di sana bisa memanfaatkan apa namanya Bendungan itu. Atau, sebelum dimanfaatkan untuk tujuan utamanya, misalkan juga sebagai sumber air bersih ya silakan bisa dimanfaatkan untuk itu, saatnya nanti dimanfaatkan bisa dibersihkan. Dan itu bisa dibersihkan karena bisa dibuka apa namanya pintu airnya, semua totalitas akan bersih, dan manakala mau dipakai untuk ya air bersih pun akhirnya masyarakat Bogor siap untuk meninggalkan aktivitas itu.

Terima kasih Pimpinan, itu saja dari saya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Sutrisno.

Berikut Pak Alimin Abdullah, kami persilakan Pak Alimin. Siap-siap Pak Hanan.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Iya, Terima kasih.

Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua.

Mohon maaf teman-teman dan Pak Menteri. Saya ini betul-betul luar biasa melihat apa yang menjadi tugas menjadi tanggung jawab mitra kami ini, jadi KKP ini menurut saya luar biasa dia tidak hanya urusan di darat, di darat, di laut, dan di darat juga yang ada danau ada sungai menjadi urusan kita juga karena masalah perikanan. Jadi begitu luasnya dan tanggung jawabnya, padahal di bidang ini kita sebetulnya memang masih tertinggal dari negara lain. Kita punya ikan yang banyak itu, selama ini kita masih teriak dimaling orang, karena pengawasan kita dan kemampuan kita menangkapnya sendiri masih kurang. Jadi kalau ini diserahkan sama Kementerian ini, saya kira ini kan bukan iseng-iseng dibuat Kementerian karena memang masalah besar buat negara kita, kita belum mampu mengambil nikmat Rahmat dari Tuhan di negara kita yang begitu besar hanya dimaling orang, hanya dimanfaatkan orang, kita tidak bisa. Saya lihat tugas-tugas yang diberikan dan tanggung jawab sama Kementerian ini luar biasa dan ini penting semua untuk saya Pak, saya lihat mulai dari yang misalnya saja untuk di dalam suasana kita yang menghadapi dunia kita disini kita diminta meningkatkan untuk peningkatan ekspor, nah ini hal-hal yang tidak mudah ini Pak. Jadi kalau dia *nggak* mudah dia memerlukan alat, memerlukan ilmu, memerlukan tenaga, dan juga sesuatu perbaikan yang selama ini kita tidak ada.

Selain itu juga hal yang saya lihat, kita juga harus melakukan konservasi ke pulau-pulau kecil. Pak Menteri, ini kalau kita jujur, negara kita memang terlambat mengurus pulau kecil. Namanya pun ada belasan ribu pulau yang tidak punya nama, memberi nama aja *nggak* mampu, kita mau apa mengadakan konservasi pulau-pulau kecil, ngurus pantainya, apalagi mengurus tambangnya, macam-macamnya, jadi menurut saya ini bukan sesuatu pekerjaan yang ringan dan kecil ini sebetulnya kalau betul-betul tugas ini diberikan kepada KKP. Jadi pulau kecil itu saja jumlahnya saja belasan ribu, namanya saja belum tahu, apalagi mau melihat potensi yang ada di sana sehingga tanpa kita ketahui kadang ada yang sudah menambang liar dan berbagai macam sepertinya, dan juga ada yang menjadi tempat penyelundupan.

Nah yang terakhir, saya lihat juga kita punya beban pengawasan Pak dan ini yang paling lemah selama ini. Walaupun anggaran kita besar berikan sama Kepolisian TNI, ternyata masih juga pencurian itu terjadi karena mungkin banyak lagi urusan yang diurus polisi. Kalau bicara anggaran Pak, kepolisian itu sendiri ratusan triliun, tapi kepada pengamanan laut kita kepada siapa sebetulnya, hutan kita yang pada ditebangin itu kepada siapa kita, penyelundupan masuk terus negara kita pada siapa kita minta, kita sudah berikan yang begitu besar. Nah, yang sekarang langsung menyangkut makanan kita, menyangkut lingkungan kita, menyangkut negara, menyangkut kekayaan kita. Jadi menurut saya, kalau betul kita ingin mempunyai Kementerian Kelautan Perikanan ini, ini *nggak* main-main. Kalau mau jujur barangkali anggarannya mesti di atas kepolisian itu Pak, mengurus seluruh rakyat kita mulai dari hidupnya, sumber hidupnya, dan juga buat gizinya, makanannya. Jadi menurut saya kita pantas juga, saya setuju dengan kemarin itu teman-teman Komisi IV mengharap, ini menerangkan se jelasnya kepada pemerintah, ini iseng-iseng atau apa ini memberikan tugas kepada KKP. Apakah sebesar ini tugas yang diberikan, maka kita Komisi IV ini harus bersama-sama KKP ini meminta anggaran yang benar, jangan seperti kaleng-kaleng nih KKP ini. Sebab kalau kita gagal Pak, bukan hanya Menteri yang salah kami Komisi IV juga akan kena getahnya. Nah kenapa kita mau terima katanya memberi tugas menerima tugas yang sekian besar, tapi kita terima juga anggaran yang seadanya.

Nah ini barangkali memang sesuatu yang tidak mudah saya katakan, tetapi komisi lain juga sudah sering mengalami seperti ini dan kita panggil Menteri Keuangannya. Nah, di Komisi I juga pernah begitu Pak. Jadi menurut saya pada tepatnya, apalagi kita mau menghadapi yang sudah kita gambar gamborkan (*suara tidak jelas*) yang kita hadapi. Sebab masalah pangan ini Pak kita tidak bisa bilang ketahanan, kalau dulu kita punya uang kita bisa beli dari luar, kalau orang lain *nggak* jual gimana. Jadi kita memang harus tingkatkan betul kemampuan kita, mengolah kita punya, dan menangkap memanfaatkan kita punya. Jadi kalau kita tidak bisa menangkap ikan kita, tidak bisa mengawasi ikan kita, terus gimana. Jadi menurut saya pulau-pulau.

Dan ini ada lagi, ada hal yang sederhana. Ini semua garam pun juga diberikan sama kita nih rupanya Pak, saya *nggak* tahu apakah uang betul ini diberikan KKP, mestinya garam ini barangkali Perindustrian barangkali menurut

saya ya. Tapi begitu banyaknya diberikan tugas ini, tapi jauh betul bayangan imbangannya. Bayangkan, apa yang diminta sama beberapa, istilahnya ini contoh yang paling (*suara tidak jelas*), sampai hari ini pun kita belum puas, rakyat malah jadi ragu sama kepolisian, tapi anggarannya sudah luar biasa sekarang ini Pak. Nah kenapa *nggak* ini yang begini pentingnya kita tidak bisa jelaskan sama Presiden dan Menteri Keuangan kita dan Bappenas. Mari kita buka, ini betul-betul *nggak* semua ini mau diurus sama KKP ini, laut yang begitu luas iya kan, terus produksi ikannya selama ini selalu dicuri orang, apakah kita harus biarkan seperti ini rakyat kira tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau tanpa kita memberikan anggaran yang besar untuk dia mengikuti menyaingi orang-orang yang dari luar, tetap aja kalah terus kita, apapun teorinya juga kita cuma dibohongi saja, karena kita lemah dalam pengawasan. Jadi terus terang aja kita berikan yang namanya terukur tadi saya khawatir begitu, tambang kita saja *nggak* bisa kita awasi Pak, PNBPNya aja kadang-kadang *nggak* ketagih sama kita, iya tambang-tambang kita dan ini fakta.

Jadi mari kita betul-betul kalau mau meningkatkan kemampuan dan KKP ini memiliki wewenang dan tugas ini saya yakin dan sudah terbukti dengan anggaran itu kita bisa digunakan dengan baik WTP, jadi pada tempatnya. Sekarang negara ini memberikan anggaran yang pas untuk tugas yang diberikan ini menurut saya, jadi kita Komisi IV memang harus menjelaskan betul supaya rakyat juga membantu. Terus terang saya kalau jujur Pak Menteri, saya ini belum pernah masuk Komisi IV, tapi terakhir-terakhir ini banyak rakyat bilang Anda setiap turun ke sini kami tanya selalu *nggak* bisa jawab karena Komisi I, saya bilang Komisi IV, kenapa *nggak* masuk Komisi IV. Setiap kami tanya pupuk, anda angkat tangan, iya kan. Kalau ada orang tanya bibit, kita angkat tangan, karena bukan urusan kami. Anda tiga kali sudah jadi (*suara tidak jelas*), oke saya bilang, saya juga *nggak* ngerti itu urusan dari Komisi IV. Tapi hari ini saya mulai dari KKP ini saya lihat memang *nggak* main-main, tugas yang diberikan sama Kementerian-kementerian di Komisi IV bukan yang yang kaleng-kaleng.

Jadi menurut saya, mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya adalah orang yang baru melihat, menurut saya ini luar biasa. Dan kalau kita berhasil betul-betul mengelola ini, akan terjadi perubahan besar di negara ini dan jadi terhormat negara kita. Jadi kita mau apa tidak, tergantung negara serius apa *nggak* memberikan atau membuka. Saya *nggak* tahu sejak kapan ada Kelautan dan Perikanan ini, tapi kalau udah dianggap perlu, maka harus negara secara konsekuen memberikan anggaran yang benar. Kalau menurut saya terus terang aja kalau masih dibawah 40 masih kecil Pak, kalau begini luas yang mau diurus, yang mau kita perbaiki rakyatnya, kemampuannya, pengawasannya, teknologinya. Jadi menurut saya, saya mohon maaf, saya masih tetap dukung teman-teman kemarin yang ingin Pak Ketua, kita meminta Menteri Keuangan dan Bappenas hadir di sini dan kita buka-bukaan, kita (*suara tidak jelas*) apa tugas yang diberikan sama Komisi IV dan Menteri.

Itu saja barangkali saya harapkan, terima kasih. Supaya kita mengupas terus dengan dana yang kecil ini kita menjadi pelik luar biasa, karena memang saya lihat luar biasa untuk. Karena negara ini sendiri mau memperkuat juga susah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik.

Terima kasih Pak Alimin.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Iya. Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya terima kasih tadi masukannya Pak Alimin udah tepat kayaknya masuk Komisi IV, Pak. Akhirnya dari PAN ini ada kader yang tokcer nih sekarang nih. Terima kasih Pak Alimin ya kita mohon dukungannya juga dan sekian lama akhirnya ya Pak Alimin ke sini ke Komisi IV itu bener.

Kami lanjutkan, Pak Hanan Rozak. Setelah itu, siap-siap Bu Nur'Aini.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV serta Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Pertama, terkait dengan kinerja pencapaian 2022, mohon perhatian ini sudah di akhir triwulan ke-3 ya kita mau masuk ke triwulan ke-4 seharusnya kita pada posisi di 75% Pak penyerapan anggaran maupun realisasi kegiatan. Di sini ada dua yang saya lihat perlu perhatian ini dari Dirjen Perikanan Tangkap dan Sekjen ya yang masih di bawah 60% ya, jadi mohon perhatian ya. Percepatan-percepatan sudah dibuka kan, *refocusing* sudah dibuka, *automatic* sudah dibuka ya, jadi saya kira perlu percepatan-percepatan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan keterbatasan anggaran ya. Kita harapan kita pada saatnya nanti ada di 12T, sekarang baru mencapai 6,7 ada peningkatan sedikit ya. Nah tentunya dengan yang sedikit ini harus bener-bener di *eman-eman*, di hemat-hemat, digunakan untuk hal-hal yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Jadi kalau melihat saya melihat bahwa urusan yang dikerjakan oleh KKP ini kalau saya sederhanakan ada tiga, pertama pengaturan sebagai apa pemerintah yang ngatur dengan aturan-aturan. Kemudian yang kedua pelayanan, pelayanan

kepada masyarakat nelayan maupun masyarakat pembudidaya. Kemudian yang ketiga menjaga kelestarian sumber daya alam ya.

Nah, kemudian terkait dengan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sudah diberikan perhatian, dari posisi anggaran komposisi anggaran yang tinggi ada di 2 ini. Termasuk yang berikutnya adalah dari BPSDMKP, ini saya kira sudah sesuai dengan harapan kami. Nah namun demikian, saya mengharapkan adanya perhatian baik di 2003 2023 maupun tahun-tahun berikutnya terkait dengan masyarakat nelayan, kemudian buruh buruh nelayan ya yang bekerja sebagai anak buah kapal dan sebagainya, kemudian pembudidaya.

Nah, kalau di budidaya itu persoalan utama yang saat ini kita hadapi dihadapi oleh masyarakat pembudidaya adalah terkait dengan benih ya benih yang bermutu, kemudian bagi penangkar benih adalah indukan. Ini sudah mulai digagas, sudah mulai ada, namun perlu perluasan ini Pak. Jadi di lapangan itu bagaimana kita mendekatkan benih itu ke masyarakat pembudidaya, artinya apa? harus kata hidupkan penangkar-penangkar benih yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Jangan mengandalkan dari Balai Benih kita, Balai Benih kita seharusnya menghasilkan indukan, sedangkan penangkaran benih itu harusnya ada di di masyarakat penangkar benih. Saya kira itu yang perlu mendapat perhatian.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pakan, Pak. Apapun yang dilakukan oleh pembudidaya, pada akhirnya adalah mereka ingin mendapatkan kesejahteraan, ingin mendapatkan pendapatan, sementara pakan itu sangat mahal. Bayangkan saja yang saya sudah cek itu ikan lele Pak ya, untuk membuat 1 kilogram ikan lele dibutuhkan pakan ya pakan ya 1 kilogram gitu, harga pakan kalau rata-rata Rp12.000,- harga lele di bioflok itu Rp16.000,- artinya dia dapat Rp4.000,- Pak per kilogram. Nah, bagaimana ini bisa kita tekan pakan ini biaya pakan ini, kesulitan yang dia pada saat kita menawarkan adanya Pakan Mandiri membuat Pakan Mandiri mereka kesulitan di tepung ikan Pak, di tepung ikan yang cukup mahal komponen tepung ikan ini masih mahal. Oleh karena itu, kedepan kegiatan apa namanya pembuatan Pakan Mandiri ini perlu mendapat perhatian yang lebih banyak lagi dari apa namanya Direktorat Jenderal Budidaya.

Saya ingin menggarisbawahi adalah pada akhirnya adalah pendapatan Pak, mereka memelihara ikan itu mau dapat duit, bukan mau dapat ikan, tapi pada saatnya akan dijual ya. Kalau bicara ketahanan pangan untuk masyarakatnya bagaimana harga ikan itu terjangkau ya oleh masyarakat, tapi begitu si pembudidayanya adalah pendapatan, Pak. Pendapatan sangat tergantung dari pada benih, harga benih, dan harga pakan, ini ke depan harus mendapat perhatian.

Nah kemudian juga kemarin kami mengunjungi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, di Serang. Balai ini meng-cover se-Indonesia Pak ya, tapi adanya saya bilang kok adanya di tempat yang cukup terpencil ini, bagaimana menghubungi apa mendatangkan kesana. Ternyata emang waktu itu saya tanya, kenapa kok di sini bukan di Jakarta aja yang lebih mudah

menghubunginya, nah ternyata lahannya ada di sana. Tapi tidak apa-apa, hanya yang saya harapkan adalah perkuatan ini meng-cover se-Indonesia Eselon III, kedepan ini tolong ini bisa dipikirkan Pak Menteri, bisa ditingkatkan menjadi Eselon II. Atau dibuat satu lagi di wilayah timur ya di wilayah timur ada satu lagi Balai Pengujian Kesejatan Ikan dan Lingkungan, karena dia penting kalau saya lihat kerjanya penting menguji pakan, menguji apa namanya polusi dan sebagainya ya ini saya kira penting ini.

Kemudian berikutnya terkait nelayan tangkap, Pak. kedepan ini perlu adanya perhatian-perhatian kalau boleh saya bagi Pak ya itu di Perikanan Tangkap ini ada pengusahanya juragannya, ada buruhnya atau tenaga kerja yang ikut si juragan, kemudian ada keluarga nelayan. Nah, yang paling banyak itu ya keluarga nelayan dengan buruhnya nih, kalau pengusahanya sedikit, lebih sedikit maksud saya. Oleh karena itu, ini harus ada perhatian kedua ini, buruhnya ini atau anak buah si juragan ini, saya tidak tahu istilahnya apa dan keluarganya Pak, ini sudah dimulai. Termasuk lingkungan, lingkungan si nelayan itu, pemukiman nelayan sudah mendapat perhatian Kalaju, Kalaju perlu diperluas di masa-masa yang akan datang.

Nah kemudian terkait dengan kelestarian Pak, tadi di dari Kalimantan ya menyampaikan bahwa penggunaan setrum dan sebagainya ini saya kira kegiatan-kegiatan untuk Bimtek-Bimtek terkait Pokmaswas ya Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan di perairan itu perlu diperbanyak ya, karena apa? manakala yang mengawasi itu masyarakat, Insya Allah itu akan lebih lebih apa namanya berhasil lagi dibandingkan dengan yang mengawasi aparatour kita secara langsung.

Demikian sekedar masukan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Hanan. Berikut, Bu Nur'Aeni. Siap-siap Ibu Vita Ervina.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran,

Saya mengevaluasi terhadap realisasi anggaran 2022, karena mengingat 4 bulan lagi ini sudah harus selesai. Dan dari kebijakan program di Dapil saya ini ada program Kampung Kalaju dan rehabilitasi mangrove yang memang sudah tersosialisasikan, serta lokusnya juga ada, anggarannya ada, mohon kiranya untuk dipercepat, direalisasikan.

Berikutnya kaitan dengan anggaran RKP 2023, mencoba untuk mendalami indikator kinerja. Ada 7 indikator salah satunya angka konsumsi ikan yang cukup luar biasa 61,02 kilogram perkapita, serta produksi perikanan kurang lebih 30,31 juta ton. Akan tetapi ini berbanding terbalik dengan persoalan di masyarakat seluruh Indonesia pasti ada khususnya Dapil saya, kaitan peningkatan angka *stunting* dan gizi buruk, ini juga menjadi konsentrasi Presiden. Pertanyaan saya, seperti apa bentuk intervensi dari KKP mengatasi penanganan gizi buruk dan *stunting*? Saya lihat bahwa programnya masih di kisaran seperti gerakan makan ikan dan bagi-bagi ikan segar juga lumayan ini Pak sangat bermanfaat, untuk itu mohon untuk bisa ditingkatkan. Yang tidak kalah penting adalah KKP juga harus melakukan intervensi koordinasi yang baik dengan daerah agar bisa bersama-sama mengatasi persoalan *stunting* dan gizi buruk tersebut.

Arah kebijakan, tadi sudah disampaikan kaitan dengan kebijakan penangkapan terukur. Saya juga mendorong bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur ini untuk dibatasi dari ukuran jenis kapal, supaya tidak memberatkan para pelaku usaha ikan yang menengah kebawah. Kaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah laut, saya mendukung sekali ini sasarannya juga lumayan luar biasa pengurangan sampah laut 70% tahun 2030. Ini sebetulnya anggarannya tiap tahunnya ada Pak, akan tetapi eksekusi dan realisasi terhadap kebijakan dan program tersebut tidak nampak. Contoh saja di Dapil saya, sebetulnya anggaran lokusnya sudah ada di Banten di Kabupaten Serang khususnya yang memiliki laut yang panjang pantai yang cukup luas ya, tetapi program ini tidak ada gitu bentuknya. Apakah mungkin berjalan, tetapi tidak mengajak kami menggandeng atau berkoordinasi entah bagaimana ini, tapi saya lihat mengevaluasi itu tidak ada. Kebijakan yang lain, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Kebijakannya juga cukup luar biasa ya mendukung sekali, akan tetapi ini reklamasi laut di Dapil saya itu masih banyak sekali nih Pak Menteri, apa yang dilakukan terhadap kebijakan tersebut Pak Menteri, tolong juga ini dilakukan intervensi pengawasan yang melekat ketat kepada daerah-daerah yang memiliki wilayah panjang pesisir pantai yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan, tidak hanya di Banten, pasti wilayah-wilayah yang lain juga yang memiliki panjang pantai yang luas akan terjadi ya reklamasi pantai, serta tadi teman-teman sampaikan bahwa masih banyak kapal-kapal asing yang masuk wilayah laut kita, yang tidak terpantau, yang tidak terawasi, ini apa langkah kedepan di tahun 2023 ini.

Dan tadi aspirasi sudah disampaikan dari Pak Hanan. Betul kami melakukan Kunspek ke Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, nah beberapa mungkin fungsi daripada Balai tersebut luar biasa untuk bisa memitigasi adanya apa nama wajah wabah penyakit ikan, ikan kita ya seperti

biasa kan kalau di Kementerian Pertanian kemarin kan ada kasus PMK. Nah untuk itu tolong diperkuat terhadap BPKIL ini Pak, karena wilayahnya cukup luas, tapi mohon maaf kondisi kemarin itu cukup memprihatinkan. Dan ada aspirasi juga, mohon kiranya penyuluh perikanan dan pegawai laboratorium yang ada di sana ini juga untuk dipertahankan agar untuk tidak dikeluarkan Pak Menteri. Ada juga aspirasi dari pemerintah daerah ini untuk DAK ya, kapal, serta pembangunan pelabuhan, ini nasibnya seperti apa.

Terakhir dukungan KKP dalam prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kenyataannya Pak Menteri mohon maaf, masyarakat nelayan kita ini kan belum ya secara utuh mendapatkan ketahanan ekonomi secara berkeadilan, mengingat kita tahu bahwa persoalan kebutuhan nelayan kita seperti kebutuhan akan BBM, belum naik saja ini sulit didapatkan, apalagi nanti BBM wacananya akan dinaikkan bagaimana nasib para nelayan kita semakin parah. Belum lagi bicara permodalan, sarana prasarana, pakan ikan yang sulit, ini menjadi persoalan.

Terakhir, untuk bisa mendorong, mengawal, bagaimana sektor pangan ini menjadi prioritas nasional kita saya berharap bahwa optimalisasi daripada politik anggaran kita ini harus kuat. Bagaimana caranya, tentu harus ada penguatan rekomendasi dari Komisi IV untuk bersama-sama disampaikan kepada Pimpinan DPR agar bersama-sama duduk dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas agar lebih memprioritaskan ke sektor pangan nasional kita.

Terima kasih.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Nur.

Terakhir ya Bapak/Ibu sekalian, Bu Vita. Waktu dan tempat kami persilakan.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E.,MBA):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan jajarannya,

Sedikit saja saya *highlight* karena teman-teman tadi sudah banyak menyampaikan, saya pikir sudah cukup. Saya hanya ingin mengangkat permasalahan yang ada di daerah pesisir yang lebih banyak melakukan tambak udang, kita dalam rangka memang untuk mendukung pengembangan perikanan yang tentu orientasinya ekspor. Katanya kita sedang menargetkan 2

juta ekspor udang vaname, salah satunya mungkin di daerah Dapil saya juga ingin melakukan pengembangan.

Namun ada permasalahan yang terkait dengan para penambak ini, karena mereka banyaknya melakukan penambak mandiri jadi kesulitan mereka adalah membangun IPAL. Jadi tidak ada mereka melakukan IPAL sehingga ini sangat mengkhawatirkan untuk keberlanjutan tentu dari tambak udang itu sendiri, kemudian lingkungan, dan tentunya juga kualitas dari air dan bahkan karena kita di daerah saya adalah Dapilnya juga banyak pertanian akhirnya istilahnya mengancam lahan-lahan pertanian karena kualitasnya airnya semakin menurun karena kurang IPAL ini. Jadi saya memohon kepada KKP untuk bisa juga ikut memfasilitasi para petambak udang ini rakyat ini untuk bisa dapat dibangun fasilitas pengolahan limbah udang itu. Karena saya lihat dari Ditjen PB ini sudah ada sebenarnya bantuan untuk *modelling* revitalisasi tambak udang di sini ada Amdal segala macam tapi memang masih di Kebumen yang memang tetangganya saya di Dapil Purworejo, saya berharap nanti bisa menjadi satu model tersendiri sehingga bisa juga nanti diimplif di implementasikan di daerah-daerah lain begitu. Jadi harapannya, mudah-mudahan bisa dapat *support* dari KKP untuk bisa bisa membangun IPAL di daerah-daerah para petambak Mandiri.

Terima kasih. Dari saya terima kasih, saya.

KETUA RAPAT:

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri untuk menyampaikan jawabannya, dijawab juga nanti dibuat jawaban tertulis sebagai bahan dokumentasi kami untuk RDP yang akan datang. Karena setelah ini ada RDP, setelah RDP ada Raker lagi untuk mengambil keputusan. Silakan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi IV yang hadir,

Saya kira nanti jawaban tertulis yang lebih rinci akan kami sampaikan, tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup konsen akan saya coba sampaikan disini. Yang pertama adalah soal penangkapan ikan terukur, tapi intinya sebelum masuk ke sana yakin saja bahwa kami di Kementerian Kelautan Perikanan ini memikirkan secara komprehensif sama seperti yang Bapak Ibu juga Anggota Dewan yang di sini juga memikirkan. Targetnya adalah pembudidaya ikan atau masyarakat pembudidaya ikan, baik ikan di air tawar maupun di pesisir, ataupun di laut. Selain juga para nelayan, kami sudah mengidentifikasi nelayan itu ada 2,2 juta yang kita *plotting* di masing-masing. Nah ini dari Indonesia merdeka sampai hari ini kita tengarai, kalau misalnya sebagai ukuran kesejahteraan itu ada nilai tukar nelayan atau nilai tukar

pembudidaya ikan, pencapaian tertinggi itu ada di angka 107, 102, dan kemudian targetnya 107.

Saya mau sampaikan kepada Bapak/Ibu semua, kalau angka 102 atau 107 kita *break down* angkanya, mereka tetap miskin. Jadi berapa sebetulnya mereka itu supaya dia bisa sejahtera, tidak kurang dari 120% baru mereka betul-betul bisa sejahtera. Hal ini pernah kami sampaikan dengan Menteri Bappenas di Rapat Bappenas juga kami sampaikan ada BPS juga, sampai mereka mengatakan iya betul juga ya selama masyarakat itu tetap dibebankan dengan partisipasi modal, maka selamanya juga mereka tidak akan pernah sejahtera. Ini yang jujur saja kami pikirkan dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu dengan keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki. Namun demikian kami tidak pernah mengeluh, kami terima kasih atas dukungan dari Bapak/Ibu semua terhadap hal-hal yang menjadi hal yang sangat esensial yaitu adalah soal anggaran yang yang yang kita hadapi.

Nah, terhadap hal lain yang paling penting salah satunya adalah ada 5 program besar yang kami sampaikan. Yang pertama adalah soal konservasi itu bicara soal ekologi. Yang kedua soal penangkapan ikan terukur, ekologi, dan menjaga keberadaan populasi ikan itu tidak terjadi *overfishing*. Dulu pernah kami sampaikan di dalam FGD dan kami akan minta kepada Pak Sekjen untuk diagendakan kembali, saya kira khusus saja secara komprehensif supaya tidak lagi pertanyaan memang suka lupa ya maklum kita juga kadang-kadang juga begitu. Kenapa itu tidak bisa berjalan, belum berjalan, karena setiap langkah yang akan atau kebijakan yang akan kita jalan itu memerlukan payung hukum dan payung hukum tidak bisa dibuat oleh KKP sendirian, harus melalui izin Presiden, harus melalui berbagai macam Kementerian Hukum dan HAM, lalu harus dirapatkan dengan Kementerian terkait dan ini panjang sekali ternyata, saya baru sadar juga. Waktu saya bicara kebijakan ini yang paling efektif, kenapa? kita hadirkan industri di wilayah itu, dia tidak boleh kemana-mana, hasilnya gimana supaya hasilnya ini kita bisa buat membantu nelayan kecil yang tidak pernah sejahtera itu. Kalau sekarang ngandelin dari APBN pasti tidak bisa hanya dengan 6,1 50%-nya dibagi 9 Eselon I, angkanya ya cuman ratusan miliar dengan jumlah penduduk dengan jumlah nelayan biasa aja 2,2 juta, belum lagi pembudidaya air tawar. Nah, inilah yang yang kita hadapi dan tapi saya punya keyakinan kalau kami beserta dengan seluruh Anggota Dewan yang ada di sini, kalau kita kerjakan ini nanti katakan misalnya 2023 mulus seluruh infrastrukturnya sudah selesai semua dan bisa dijalankan barangkali ini adalah *legacy* kita bersama. *Legacy*-nya Komisi IV dan juga *legacy* negara ini untuk kemudian mulai mengangkat mereka, mereka bisa lebih sejahtera.

Yang kedua, pembudidaya. Pembudidaya kita tidak bisa juga seperti tadi Bu Vita mengatakan apa namanya para pembudidaya tradisional dia menjalankan, tidak mampu mereka membangun IPAL, karena IPAL ini mahal. Padahal IPAL adalah prasyarat utama bahwa budidaya itu berhasil dengan baik, ada standar yang disebut dengan *best practice*. *Best practice*-nya itu kalau udang vaname 1 hektar itu 40 ton, tapi negara ini tidak pernah mencapai angka itu, nah itu yang harus dilakukan.

Gimana caranya? Caranya adalah kami beserta dengan tim budidaya sedang itu salah satu program ketiga yaitu pengembangan budidaya, *modelling* dan revitalisasi. *Modelling* adalah satu program yang kita lakukan yang akan kita lakukan salah satu yang menjadi lokasi itu di Sulawesi Barat, Sulawesi Barat mudah-mudahan itu nanti cocok Pak karena kemarin di Lombok itu di tempat Pak Johan kurang Pak, jadi kita sedang mencari lagi di daerah situ juga untuk bisa. Dan memang ternyata tidak mudah, agak lama juga itu mencari lokasi yang sesuai dan tepat bahwa dia masuk dalam standar kualifikasi yang benar. Nanti kalau itu bisa berhasil, maka 2 juta ton yang ditargetkan oleh pemerintah produksi udang ini akan bisa terjadi. Kalau itu terjadi, maka kita nanti sekali waktu ketika kita rapat, Indonesia belum pernah masuk dalam 10 besar eksportir perikanan padahal kita negara maritim, nah insya Allah itu bisa terjadi. Nah bagaimana caranya supaya bisa terjadi? tidak mungkin itu mengandalkan APBN, yang dilakukan adalah *modelling* dengan cara kita mengundang investor begitu. Nah ini nanti juga minta bantuan Bapak/Ibu di wilayah Dapilnya untuk kemudian kita bisa jalan.

Ada APBN yang kita kerjakan, tadi Bu Alien mempertanyakan yang ada di Kebumen. Pembangunan infrastruktur untuk seluas 100 hektar, 175 dan kurang lagi ya Pak ya karena ada *refocusing*, jadi ya *nggak* jadi lengkap 100 Bu tapi itu mungkin jadinya nanti cuman 40 hektar *net*. Tapi *nggak* apa-apa, itu menjadi *show case* karena di atasnya adalah masyarakat dan Insya Allah ini Desember bisa selesai. Hari ini kalau Ibu misalnya berkenan, barangkali dalam beberapa waktu yang akan datang Pak Dirjen Budidaya akan bisa mengantar karena proses konstruksinya sedang berjalan. Nah, itu adalah satu lokasi yang kecil tapi menjadi *modelling*, walaupun sebetulnya kalau secara infrastruktur dan lokasi yang namanya di Pulau Jawa sudah tidak sudah tidak layak untuk budidaya udang. Yang paling cocok adalah Indonesia Timur tempatnya Pak Lema sana itu Insya Allah Pak, kita akan bangun ke sana, tapi ya mohon maaf *nggak* bisa cepet Pak, mohon maaf *nggak* bisa cepat ternyata. Saya dulu kalau di swasta mikirnya hari ini ngomong, besok di 1 bulan paling lama udah jadi. Tapi kalau di pemerintahan *nggak* bisa, memang semua pihak harus diberi pemahaman.

Ibu Saadiah tadi, *nggak* ada ya. Nah itu kalau di Maluku, apakah ada DAK? Saya sudah cek ada Bu DAK, jadi kita mengajukan DAK itu banyak sekali dan itu kita ajukan melalui Bappenas, lalu kemudian nanti Bappenas dan Kemenkeu yang menentukan berapa sebetulnya dengan berbagai macam prioritas yang beliau tentukan. Nah tapi di sini Maluku baik provinsi maupun kota kabupaten/kota sudah dapat, walaupun memang tidak besar gitu ya.

Sekali lagi untuk penangkapan ikan terukur, saya ingin betul-betul ini dilakukan FGD sekali lagi yang rinci dan detail, supaya Bapak Ibu, ini mohon maaf saya pernah keliling Pak Johan di daerah Pantura mereka hanya SD *nggak* lulus, tapi saya tanya kapalnya berapa Bu? 38 katanya. Wah kapalnya 38, berarti pengusaha, ini pengusaha. Iya ini Pak, begitu kapalnya 38. Nah kalau dia 38 kan pengusaha, nah ini harus bisa dibedakan Pak, nah ya kan. Untuk kemudian kita tanya, nangkarnya nanti lain kali kalau misalnya nangkarnya di Arafura harus berhenti Arafura ya, wah *ndak* bisa Pak musti ke sini juga. Nah, ini kayak gini-gini harus dikasih pengertian ini Pak Johan. Jadi

kalau kita harap ke depan itu kita ingin meredistribusi pertumbuhan ekonomi, tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Jadi yang saya berharap nanti kira-kira 5 tahun yang akan datang di tempatnya Pak Lema itu ada industri perikanan hidup di sana, bukan dari sana dibawa semua ke Jawa gitu, kalau saat ini sentral pasarnya dari Jawa semua. Kemarin kita uji coba di Biak ada 80 ton tuna dalam satu bulan *nggak* bisa diangkut padahal itu harusnya *fresh*, kalau harganya *fresh* itu Pak bagus langsung ke Jepang. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, akhirnya ada pesawat ke sana Garuda dibawa dulu ke Makassar, dari Makassar baru ekspor ke sana. Tapi akhirnya kualitasnya berubah dia menjadi kualitas yang *frozen*, nah *frozen* itu harganya 50% dari harga *fresh*, itu salah satu. Jadi ini adalah. Jadi banyak sekali yang harus kita perbaiki, jadi kalau itu berhasil di sana bayangkan, nelayan-nelayan sana itu dia dapat tuna itu bisa langsung *fresh* langsung bisa diangkut.

Saya kira demikian Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari seluruh Anggota Komisi IV. Khusus ke Ibu Nur soal *stunting*, di Serang juga sudah kita kerjakan Bu, ada datanya di sini. Jadi soal *stunting* kita KKP ikut terlibat semaksimal mungkin yang kami bisa lakukan itu kami lakukan.

Terima kasih.

Demikian Pimpinan, atas waktu dan kesempatannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Saya minta tolong dicek lagi perihal pinjaman utang luar negeri. Tadi disampaikan Rp76 miliar, tapi informasi yang saya dapatkan jauh lebih besar daripada Rp76 miliar, nilainya kurang lebih hampir USD 400 juta, termasuk rinciannya juga saya dapat infonya. Tolong dicek lagi, supaya ada kejelasan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Dari *(suara tidak jelas)* ...

INTERUPSI F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ketua, interupsi dong.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Menteri, mohon izin berdiskusi Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Iya 1 menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Iya. Kebijakan itu lahir dari paling atas paradigma, diturunkan jadi teori, lalu ada kebijakan. Kalau saya periksa isi kepala Pak Menteri soal konsep penangkapan terukur Pak Menteri, ini teorinya ini yang Pak Menteri pakai ini teori *trickle down effect* yang persis dipakai pada era orde baru. Kata kuncinya 3: stabilitas, iklim investasi yang baik. Yang kedua pertumbuhan dan ini ada *privilege* akses yang utama bagi para mohon maaf kapitalis atau orang kaya dan diharapkan dari sana akan ada merembesnya kue ekonomi akan terwujudnya keadilan. Teori ini 32 tahun gagal, kita bisa cek di Bapaknya Budi Djiwandono ini, gagal Pak, rembesannya tidak ke bawah tetapi ke samping apalagi tadi diceritakan cukup panjang lebar oleh Pak Alimin mengenai kelemahan kita dalam pengawasan. Ini teori pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pemilik modal atau kapitalis mengumpulkan kue ekonomi dan dari sana nanti akan ada kesejahteraan yang dibagi kepada masyarakat lain.

Yang kedua Pak, soal penangkapan terukur ini menurut saya yang harus dibuka itu adalah akses yang setara kepada semua kelompok masyarakat. Setelah dibuka, nelayan kecil tradisional ini harus diberikan keberpihakan pemberdayaan sehingga mereka juga mampu.

Dan yang ketiga ada hal yang sangat penting, makanya saya bilang kita harus hati-hati. Bicara perikanan dan kelautan bagi orang Maluku ini identitas dan budayanya, bahkan sejak zaman Neo, *sorry*, Kolonialisme klasik, *yes*, sampai hari ini. Karena itu, terus terang Pak Menteri, kita berbeda dari sisi cara pandang ini. Tapi menurut saya, ketika Pak Menteri katakan bahwa akan ada pertumbuhan dan ini, oh ini *trickle down effect*. Jadi FGD, saya sudah bisa prediksi Pak, posisi kita akan tetap seperti ini.

Terima kasih.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Satu menit, Pak.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ya. Pak Menteri, artinya saya memberikan apresiasi ya program Pak Menteri dalam membangun Indonesia dari sisi perikanan. Saya cuma menyampaikan aja, memang soal regulasi, soal peraturan menteri, soal penangkapan kan belum ada, jadi kita kalau sosialisasi berjalan terus seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mas Ansi ini kan bisa jalan. Ada satu hal yang selalu diketahui oleh Pak Menteri, untuk penangkapan terukur itu diusahakan ikannya tangkap di situ, pendaratan ikannya di situ, kan itu kuncinya. Tapi kami orang Maluku juga tidak lupa bahwa konsep Lumbung Ikan Nasional untuk menjawab penangkapan terukur, jadi bukan penangkapan terukur bagian dari itu ya.

Jadi kita harapkan itu agar kita *nggak stop* soal Lumbung Ikan Nasional Pak Menteri ya, jadi kami harapkan agar industri itu sesuai perencanaan kita, rencana kita itu ada pelabuhan perlu ada di Maluku. Ada dimana? Terserah, yang penting cita-cita kita itu bisa terealisasi dan itu sudah kesimpulan kita dari Komisi IV dan kita selalu kejar. Karena yang kita hari ini kita *ngomong* Pak Menteri, kita selalu hampir setiap ditanyakan oleh masyarakat Maluku, kapan-kapan ya Anggota DPR ini ya DPR RI ya 4 orang itu ke mana aja. Jadi kami harapkan agar Lumbung Ikan Nasional diharapkan jangan dilupakan.

Lalu ada satu lagi Pak Menteri. Ini aja ini tahun '22 tahun soal ada 1 pelabuhan di Kecamatan Salahutu, yang satu saya sampaikan oleh Pak Menteri, Pak Menteri katakan belum ada duit, saya bilang okelah kalau ada duit. Ya kebetulan sudah ada DAK untuk Maluku itu mungkin saja menjadi perhatian ya Pak Pak Dirjen ya saya kira ini selalu saya usulkan untuk Pak Dirjen.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup, Pak. Terima kasih. Tolong tuh yang tadi.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum):

Izin Ketua, sedikit Ketua. Kiri Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, 1 menit Mas.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum):

Iya, siap.

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Menteri, yang penting aja Pak. Saya pikir bahwa bagaimana nelayan itu diajari tata kelolanya Pak Menteri, kayak nelayan sekarang itu kan tidak jelas mana muaranya yang dianut Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri punya penyuluh, bilang mereka kekuatan manajerial untuk menjadi manajer-manajer di setiap titik nelayan itu Pak Menteri. Nah, siapa yang nantinya akan diberikan tata kelola yang baik terus adalah para penyuluh ini Pak Menteri yang sewaktu-waktu akan diberikan tata kelola yang baik, mulai dari bentuk, perencanaannya, perluasan, dari *market*-nya dan ini akan dibentuk terus. Apalagi Pak Menteri akan mendatangkan para-para investor, nah investor ini juga akan memberikan tata kelola yang baik. Sehingga Pak Menteri apabila ada permasalahan di setiap titik nelayan, Pak Menteri tinggal panggil penyuluh itu, penyuluh itu akan di *treat* terus apakah per 4 bulan, apakah per semester, apakah per 3 bulan pertriwulan sehingga mereka akan menjadi manajer-manajer yang baik yang nantinya akan terbentuk seperti korporasi yang baik. Karena memang ini selama ini kalau saya melihat tidak ada Pak, nelayan ya nelayan saja, pulang ya pulang saja bawa. Tapi bahwa tata kelolanya ikan yang mana yang baik, yang kurang baik yang mana, yang tentunya cara pengelolaan yang benar yang bagaimana, kita punya konsul, tapi juga *nggak* kepakai Pak karena memang kurang dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan tidak ada muara yang pasti.

Saya yakin Pak penyuluh kalau Bapak berikan kewenangan dan juga Bapak latih dengan baik, tata kelolanya baik, ini muara-muara dari permasalahan nelayan ini akan Bapak mudah selesaikan dan mereka akan menjadi pandai, mereka jadi pinter. Kalau kita menunggu nelayannya pinter Pak, *nggak* ketemu-ketemu mungkin Pak Menteri. Tapi, standar untuk penyuluh, saya yakin mereka baik dan saya yakin mereka mampu Pak, mereka dibebani seberapa apapun pasti mampu. *Market*-nya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, *cold storage* digunakan seperti apa, dan bagaimana mereka bisa tahu mereka akan memberikan tahu setiap waktu kepada para nelayan, ini perubahan harga setiap saat, minggu ini, 2 hari ini, minggu depan, minggu yang akan datang, bulan ini.

Mungkin itu saja Pak Menteri. Maksud saya karena memang ini sebenarnya perikanan kita luar biasa, hanya cara manajemennya saja yang mungkin kita bentuk seperti korporasi seakan-akan tapi bahwa mereka adalah penyuluh-penyuluh ini yang akan menjadi manajer-manajer lapangan yang baik.

Mungkin itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti tolong dicek yang tadi saya katakan, mengenai pinjaman luar negeri ya. Dari dialog saran-saran dan masukan Anggota Komisi IV, sebelum acara kita akhiri kami bacakan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini. Silakan Pak Budi bacakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mohon diperhatikan bersama para Anggota, Pak Menteri juga.

Kesimpulan keputusan Rapat Kerja:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2023 sebesar Rp6.767.656.876.000,- berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pak Menteri?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Kenceng banget Ketua.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp663.435.039.000,-.

Komisi IV? Pak Menteri, angkanya sesuai?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp1.234.900.000.000,-.

Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk membenahi dan menertibkan bangkai-bangkai kapal perikanan yang mengganggu aktivitas masuk kapal perikanan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta, selambat-lambatnya 2 minggu setelah Rapat Kerja hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta guna memastikan permasalahan tersebut telah diselesaikan dan ditertibkan dengan baik.

Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan dana mitigasi bencana bagi masyarakat kelautan perikanan, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya bencana.

Komisi IV? Pak Menteri?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Izin. Kayaknya untuk poin 5 ini agak sedikit aneh-aneh gitu, kayaknya *nggak* usah aja nih yang ini. Nanti kita cari yang untuk khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya bencana tuh harus cari kata-kata yang tepat karena ini kayak bantuan sosial nih Ketua Bansos untuk BNPB ya, iya. Kayaknya ini *nggak* bisa di KKP ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya jelaskan di sini. Tadi kan sudah saya jelaskan, periode yang lalu, Menteri yang lalu, Eselon I-nya ada 4, 5 orang ke lapangan waktu terjadi tsunami di Lampung Selatan. Termasuk juga meletusnya Gunung Krakatau ya, berapa Kecamatan didatangi, perahunya berapa yang rusak, rumahnya berapa segala macam, perahunya akan diperbaiki, sampai hari ini pun *nggak* ada. Paling tidak bukan mengalokasikan, mencadangkan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Izin. Nanti kalau *nggak* kepakai, *in case* kalau tidak.

KETUA RAPAT:

Bukan mengalokasikan, mencadangkan. Cadangan itu kan bisa dipakai untuk yang lain, paling tidak nanti kalau ada bencana lagi BNPB bilang apa, kami hanya memperbaiki infrastruktur rumah nelayan, itu kerja sama sama PU. Dan nelayan yang cuma 5 GT, kita lihat di Lampung Selatan sekarang masih ada. Bukan bukan mengalokasikan, mungkin mencadangkan, apabila.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan. Izin Pimpinan. Saya tangkap apa yang Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya menangkap apa yang dimaksud oleh Pimpinan, tapi untuk mencadangkan atau mengalokasikan anggaran apalagi di salah satu kementerian atau institusi harus benar-benar sesuai dengan tupoksinya dan

harus ada pertanggungjawabannya. Karena untuk bencana di tempat saya juga pernah ada kayak gini Pimpinan, tapi yang datang yang bantu tuh BNPB.

KETUA RAPAT:

Saya paham, tapi sudah.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tunggu, tunggu Ketua, sebentar, saya belum selesai. Tapi di sana juga ada bantuan dari KKP Ketua, dari infrastrukturnya pelabuhan dan juga alat tangkap, ini waktu di zamannya Bu Susi. Saya masih ingat persis. Jadi mungkin bukan mencadangkan atau mengalokasikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta untuk mengadakan alokasi anggaran apabila terjadi, apabila terjadi bencana di wilayah tentang perikanan.

KETUA RAPAT:

Sama aja. Mungkin di Maluku Utara diberikan bantuan, di Lampung Selatan kejadiannya, Menteri PU turun, hampir berapa Menteri turun, Eselon I 5 orang turun, nyata tidak ada satu perahu pun yang diperbaiki.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua, saya izin bicara.

Saya yang mengusulkan ini tadi, saya ngomong. Saya ingin katakan kepada teman-teman, hari ini perspektif kebencanaan itu sudah digeser dari peripheral menjadi arus utama, sama seperti isu *gender*. Jadi yang namanya semua kementerian/lembaga dan negara, bahkan pemerintah daerah, harus melakukan *mainstreaming* isu, tidak saja isu *gender*, tetapi juga isu kebencanaan. Mengapa? karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, itu orang bilang supermarket bencana. Dan urusan bencana bukan semata-mata hanya ada di BNPB, tentara boleh *nggak* urus bencana? Boleh. Yang lain boleh *nggak*? Boleh. Ada fase tanggap darurat, ada fase rehabilitasi, ada fase rekonstruksi, dan seterusnya. Karena itu, terus terang yang saya mengusulkan ini karena sudah kejadian Lampung contoh, Seroja di NTT contoh, Maluku juga sudah pernah kejadian. Bahkan bukan cuma Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, semuanya harus mencadangkan anggaran ini harus.

Demikian.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Ketua.

Saya kira kalau memang menjadi satu kesepakatan boleh saja, cuma yang menjadi persoalan kami ini kan ada juga pemeriksaan dari BPK. Kalau itu posnya mau ditaruh di mana, kalau misalnya *in case* dalam satu periode kerja

1 tahun tidak terjadi apa-apa mau dikemanain karena itu tidak terserap. Nah ini mohon anunya saja. Bagi saya, saya setuju dengan Pak Lema, *nggak* masalah. Tapi gimana caranya posnya, karena harus ada pertanggungjawaban.

Terima kasih.

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Terima kasih, Pak Ketua. Izin Pak Menteri.

Jadi saya pernah rapat dengan Bappenas kami kebetulan dulu polisi, di polisi ada dana kontinjensi namanya itu, tapi di Kementerian kami tidak ada. Yang kami bisa lakukan kalau ada bencana yaitu merevisi yang ada Pak, akhirnya begitu Pak. Kami revisi, ada ada ada revisi kami bisa apa ada yang bisa dikurangi kami dealokasikan untuk apa penanggulangan atau apa membantu memberi bantuan kepada yang bencana. Itu ya kami bisa usulkan.

KETUA RAPAT:

Oke saya paham. Jadi dibuat, bukan mencadangkan, paling tidak merealokasi anggaran yang ada untuk membantu nelayan di pesisir, yang terjadi apabila terjadi bencana. Ken gitu kan? Bukan mencadangkan lho. Bukan mencadangkan, merealokasi anggaran yang ada untuk membantu nelayan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Untuk, tapi dapat mungkin ya, dapat merealokasikan begitu. dapat merealokasikan, karena. Dapat merealokasi anggaran, jadi untuknya dibuang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SEKJEN KKP (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum):

Dengan catatan tidak mengganggu aspirasi Pak.

KETUA RAPAT:

Anggota Komisi IV setuju? Pemerintah *nggak*.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Nggak. Kata dapat harus. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf nih Pak, kata dapat harus dihapus. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan merealokasi anggaran yang ada untuk membantu nelayan. Kalau dapat, berarti bisa juga tidak dapat.

KETUA RAPAT:

Iya, iya. Iya, iya. Jadi udah, kita setuju ini ya. Menteri setuju?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar, sebentar, Pak sebentar, sebentar.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan. Izin dulu Pimpinan.

Kalau seperti ini merealokasi anggaran, hati-hati kalau seandainya, harusnya.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Harus selalu ada masalahnya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Harusnya, iya, ada apa *nggak*. Pertama, kalau *nggak* dapat bagaimana? kalau bicara ini, potensi apa lagi kakak. Mau LIN lagi, LIN udah ada itu. Intinya Pak Menteri, intinya adalah apabila terjadi masalah bencana, apakah KKP punya atensi untuk membantu daerah tersebut atau tidak. Itu aja sih.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Harus dapat Pak. Kalau Perikanan dapat merealokasikan, nah itu, jadi kita bisa geser dari seluruh Eselon dengan prioritas-prioritas. Tapi kalau kalau merealokasikan tanpa ada kata dapat, berarti harus ada harus di-*budget*-kan harus dianggarkan. Kalau tidak terpakai, bagaimana pertanggungjawabannya, itu saja.

KETUA RAPAT:

Komisi IV setuju? Pemerintah?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut Bud, Bud, ke-6 Bud.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk menginventarisasi dan memetakan kebutuhan solar bersubsidi untuk melayani seluruh sentra-sentra Pelabuhan Perikanan Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan kebutuhan solar bersubsidi untuk nelayan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar para nelayan dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan seperti sedia kala.

Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Komisi IV DPR RI terkait dengan Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penangkapan Ikan Terukur, Kampung Perikanan Budaya Berbasis Klaster dan Kampung Nelayan Maju.

Ini apa ada kampung-kampung lainnya ya. Kayaknya ini kita cukup fokus dengan penangkapan ikan terukur saja nih, yang lain tidak usah.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Peningkatan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota Pak, jadi harus selalu ada kuotanya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Komisi IV? Pak Menteri?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

Demikian.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ada, ada koreksi?

KETUA RAPAT:

Demikian kesimpulan rapat pada hari ini.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

Mohon maaf, tadi lupa FGD itu bukan cuma hanya di Dirjen Tangkap, di Budidaya juga kita usul. Di Budidaya juga kan kita usul untuk FGD.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Dan Budidaya.

KETUA RAPAT:

Ampun.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pak Menteri oke *nggak*?

KETUA RAPAT:

Oke? Ya, kita ketuk lagi ya.

(RAPAT:SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini, kami persilakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup pada sore hari ini.

Silakan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang hadir pada hari ini.

Apa yang sudah disampaikan dan itu adalah merupakan satu tantangan dan dukungan untuk kemajuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keberhasilan Kementerian Kelautan Perikanan saya kira juga keberhasilan dari seluruh Anggota Komisi IV yang ada di sini.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV kami mohon maaf apabila selama kami memimpin ada kekurangan, kehilafan.

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.20 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002